

**TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)**

**EFEKTIVITAS MANAJEMEN PERSAMPAHAN  
PADA DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN  
PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN NUNUKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**



**UNIVERSITAS TERBUKA**

**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi  
Bidang Minat Administrasi Publik**

**Disusun Oleh :**

**UMI KALSUM**

**NIM. 500893578**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS TERBUKA  
JAKARTA**

**2016**

**ABSTRACT****EFFECTIVENESS OF WASTE MANAGEMENT IN THE DEPARTEMENT  
OF SANITATION, PARKS AND FIRE DISTRICT NUNUKAN NORTH  
KALIMANTAN PROVINCE**

Umi Kalsum  
[umi186324@gmail.com](mailto:umi186324@gmail.com)

*Graduate Studies Program  
Indonesia Open University*

*The purpose of this study was to determine the effectiveness of waste management at the Department of Sanitation, Parks and Fire Nunukan North Kalimantan province. The theory used in this research is the theory of functions of management proposed by G. R. Terry teridi of Planning, Organizing, and Controlling Actuating. The method used in this research is descriptive method with qualitative approach. Determination of informants in this research is purposive sampling. Data were collected by using observation, interview, documentation study, and the study of literature. Data analysis technique conducted a qualitative descriptive. The results of this study indicate that waste management in Nunukan province of North Borneo is still not effective, it is due to the low implementation of the principles of management by the Department of Sanitation, Parks and Fire Nunukan, condition of facilities and infrastructure are inadequate, lack of community participation as well as the application of regulations that are less effective. Therefore DKPPK Nunukan district needs to increase the number of workers, especially in the field of Hygiene to be more effective waste management, as well as the necessary legislation regarding the technical implementation of the waste management levy to manage them.*

**Keywords:** *Effectiveness, Waste Management*



**ABSTRAK****EFEKTIVITAS MANAJEMEN PERSAMPAHAN  
PADA DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN  
PEMADAM KEBAKAAN KABUPATEN NUNUKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

Umi Kalsum  
[umi186324@gmail.com](mailto:umi186324@gmail.com)

Program Pascasarjana  
Universitas Terbuka

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas manajemen persampahan pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori fungsi manajemen yang dikemukakan oleh G. R. Terry yang terdiri dari *Planning*, *Organizing*, *Actuating* dan *Controlling*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen persampahan di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara masih belum efektif, hal ini disebabkan karena masih rendahnya penerapan prinsip-prinsip manajemen pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan, kondisi sarana dan prasarana yang tidak memadai, kurangnya partisipasi masyarakat serta penerapan regulasi yang kurang efektif. Oleh karena itu DKPPK Kabupaten Nunukan perlu menambah jumlah pekerja khususnya di Bidang Kebersihan agar pengelolaan sampah lebih efektif, serta diperlukan Perda mengenai pelaksanaan teknis pengelolaan sampah antara retribusi dengan pengelolaannya.

**Kata Kunci:** Efektivitas, Manajemen Persampahan

**UNIVERSITAS TERBUKA  
PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

**PERNYATAAN**

TAPM yang berjudul Analisis Manajemen Persampahan Pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Nunukan, 23 Oktober 2016

Yang Menyatakan

METERAI  
TEMPEL  
9E96CADF874497617

6000  
ENAM RIBU RUPIAH



Meterai Rp. 6.000,-

(Umi Kalsum)

NIM. 500893578

**UNIVERSITAS TERBUKA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

**PERSETUJUAN TAPM**

Judul TPAM : Efektivitas Manajemen Persampahan pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara

Penyusun TPAM : Umi Kalsum  
NIM : 500893578  
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik

Hari/Tanggal : Minggu, 23 Oktober 2016

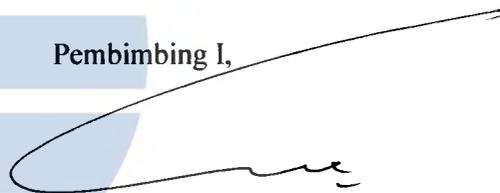
Menyetujui:

Pembimbing II,



Djaka Permana, M.Si., Ph.D.  
NIP. 090903265

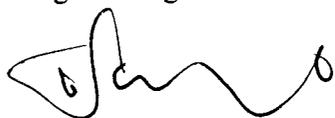
Pembimbing I,



Dr. Samodra Wibawa, M.Sc.  
NIP. 19650827199103 1 001

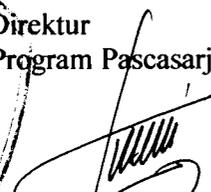
Mengetahui:

Ketua Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Magister Ilmu Administrasi Publik



Dr. Darmanto, M.Ed.  
NIP. 19591027 1986031 003

Direktur  
Program Pascasarjana



Suciati, M.Sc., Ph.D.  
NIP. 19520213 198503 2 001



**UNIVERSITAS TERBUKA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

**PENGESAHAN**

Nama : Umi Kalsum  
 NIM : 500893578  
 Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik  
 Judul TPAM : Efektivitas Manajemen Persampahan pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Ilmu Administrasi Publik Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka Jakarta pada:

Hari/Tanggal : Minggu, 23 Oktober 2016  
 Waktu : 09.30 – 10.00 WITA

Dan telah dinyatakan LULUS

**PANITIA PENGUJI TAPM**

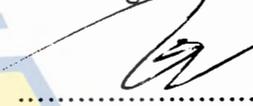
Ketua Komisi  
 Nama: Dr. Liestyodono B.I, M.Si.

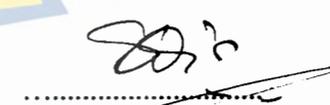
Penguji Ahli  
 Nama: Prof. Dr. Sri Suwitri, M.Si.

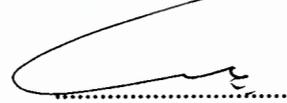
Pembimbing I  
 Nama: Dr. Samodra Wibawa, M.Sc.

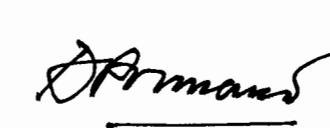
Pembimbing II  
 Nama: Djaka Permana, M.Si., Ph.D.

Tandatangan









## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat, Karunia dan Hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini dengan baik. Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini berjudul: **“Efektivitas Manajemen Persampahan pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara”**.

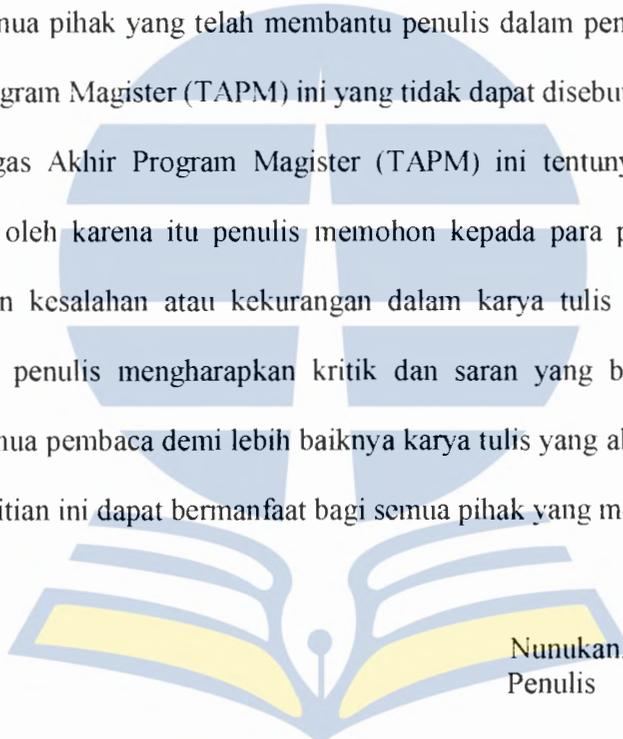
Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains (M.Si.) pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka Jakarta. Penelitian ini menganalisis tentang efektivitas manajemen persampahan pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara.

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Suciati, M.Sc., Ph.D. selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka.
2. Bapak Dr. Darmanto, M.Ed. selaku Ketua Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Magister Administrasi Publik Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka.
3. Bapak Dr. Samodra Wibawa, M.Sc. selaku Pembimbing I.
4. Bapak Djaka Permana, M.Si., Ph.D. selaku Pembimbing II.

5. Bupati Nunukan H. Basri, M.Si. yang telah banyak membantu penulis dalam proses perkuliahan.
6. Bapak Dr. H. Andi Ahmad, M.Kes. selaku Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan yang telah memberikan izin untuk dapat melanjutkan studi ke jenjang S2.
7. Bapak Dr. Sofjan Aripin, M.Si. Kepala UPBJJ-UT Tarakan.
8. Kedua orang tua, suami dan anak-anak tercinta yang selalu mendukung penulis sehingga dapat menyelesaikan studi ini.
9. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini tentunya masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis memohon kepada para pembaca barangkali menemukan kesalahan atau kekurangan dalam karya tulis ini harap maklum. Selain itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun kepada semua pembaca demi lebih baiknya karya tulis yang akan datang. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.



Nunukan, 23 Oktober 2016  
Penulis

Umi Kalsum  
NIM: 500893578

## RIWAYAT HIDUP

Nama : Umi Kalsum  
 NIM : 500893578  
 Program Studi : Program Studi Magister Ilmu Administrasi Bidang  
 Minat Administrasi Publik  
 Tempat/Tanggal Lahir : Tarakan / 28 Mei 1967  
 Alamat Rumah : Jl. Yos Sudarso RT.01 No. 42 Psr. Lama Nunukan  
 Riwayat Pendidikan : Lulus SD di Nunukan (Kaltim) pada tahun 1979  
 : Lulus SMP di Nunukan (Kaltim) pada tahun 1982  
 : Lulus SMA di Tarakan (Kaltim) pada tahun 1985  
 : Lulus SI di Malang (Jatim) pada tahun 1994  
 Riwayat Pekerjaan : Tahun 2007 s/d 2008 sebagai CPNS di Dinas  
 Pertambangan dan Energi Kab. Nunukan  
 : Tahun 2009 s/d 2011 sebagai PNS dan sebagai staf  
 pelaksana di Bidang Migas di Dinas Pertambangan  
 dan Energi Kab. Nunukan  
 : Tahun 2011 s/d 2015 sebagai Kasubbag Penyusun  
 Program dan Pelaporan di Dinas Pertambangan dan  
 Energi Kab. Nunukan  
 : Tahun 2015 s/d sekarang sebagai Kasubbag Umum  
 dan Kepegawaian di Dinas Kebersihan, Pertamanan  
 dan Pemadam Kebakaran Kab. Nunukan

Nunukan, 23 Oktober 2016

Umi Kalsum  
NIM: 500893578

## DAFTAR ISI

	Halaman
<i>ABSTRACT</i> .....	i
ABSTRAK.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan penelitian.....	7
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Kajian Teori.....	12
1. Konsep Kebijakan Publik.....	12
2. Konsep Pelayanan Publik.....	15
3. Konsep Efektivitas.....	17
4. Konsep Manajemen.....	21
5. <i>Manajemen Pengelolaan Sampah</i> .....	28
C. Kerangka Berfikir.....	34
D. Definisi Konseptual dan Operasional.....	34
<b>BAB III    METODE PENELITIAN</b>	
A. Desain Penelitian.....	35
B. <i>Sumber Informasi dan Pemilihan Informan</i> .....	36
C. Instrumen Penelitian.....	37
D. Prosedur Pengumpulan Data.....	38
E. Metode Analisis Data.....	39

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASA	
A.	Deskripsi Objek Penelitian.....	41
1.	Gambaran Umum Kabupaten Nunukan.....	41
2.	Gambaran Umum Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan.....	44
3.	Visi dan Misi Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan.....	61
4.	Tujuan dan Sasaran Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan.....	63
5.	Strategi dan Kebijakan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan.....	64
6.	Kedaaan Sumber Daya Manusia Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan.....	68
B.	Hasil dan Pembahasan.....	69
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan.....	114
B.	Saran.....	115
DAFTAR PUSTAKA.....		116
LAMPIRAN		

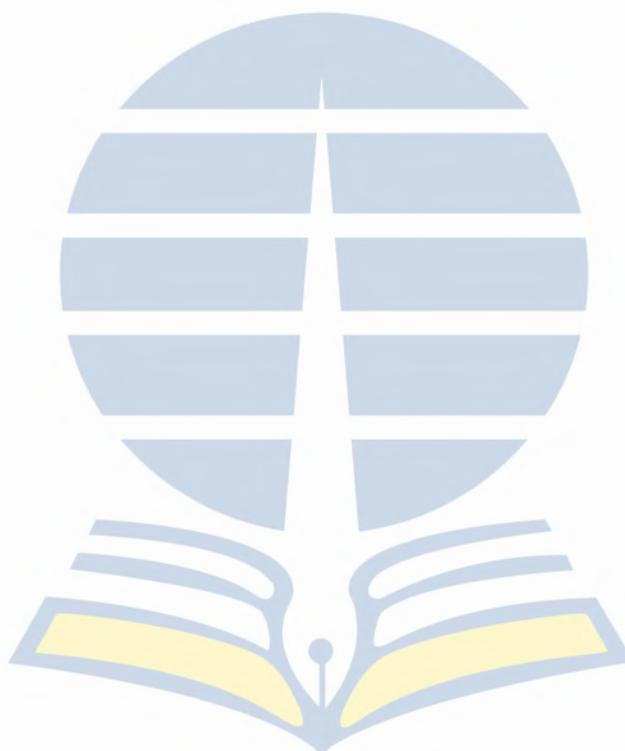
## DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 4.1	Data Timbulan Sampah Berdasarkan Jumlah Penduduk Pulau Nunukan Tahun 2015.....	46
Tabel 4.2	Daya Sampah Yang Dikelola 2015.....	48
Tabel 4.3	Penjelasan Visi Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan.....	62
Tabel 4.4	Misi dan Tujuan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan.....	63
Tabel 4.5	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam kebakaran.....	65
Tabel 4.6	Komposisi Sumber Daya Manusia Menurut Jabatan.....	68
Tabel 4.7	Komposisi Sumber Daya Manusia Menurut Tingkat Pendidikan.....	68
Tabel 4.8	Komposisi Sumber Daya Manusia Menurut Golongan.....	69
Tabel 4.9	Produksi Timbulan Sampah Yang Di Kelola Berdasarkan Laporan Pengawasan TPA 2015.....	74



## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir.....	34



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia dan lingkungan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Manusia membutuhkan kondisi lingkungan yang baik agar dapat melaksanakan aktivitasnya, sebaliknya kondisi lingkungan yang baik tergantung pada aktivitas manusia terhadap lingkungannya. Perkotaan sebagai pusat aktivitas manusia telah berkembang dengan pesat dan berperan sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, kebudayaan, pariwisata, transportasi maupun industri.

Perkembangan industri dan penambahan jumlah penduduk yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, dapat meningkatkan sampah industri dan sampah domestik yang dihasilkan oleh penduduk sehingga semakin membebani tanah, udara dan sungai yang mengalir dalam wilayah perkotaan. Setiap tahunnya penambahan jumlah penduduk Indonesia sebesar 2.6 juta jiwa (BPS 2015). Akibat penambahan jumlah penduduk yang setiap tahunnya terus mengalami peningkatan, maka jarang sekali dalam suatu wilayah kota di temukan ruang terbuka yang dapat digunakan untuk daerah pemukiman yang layak.

Secara nasional, diperkirakan 38,5 juta ton sampah diproduksi setiap tahun (Jurnal Prakarsa Infrastruktur Edisi 15 April 2015). Angka ini setara dengan sekitar setengah kilogram sampah per orang per hari. Volume dan komposisi sampah bervariasi berdasarkan daerah tempat tinggalnya apakah di daerah perdesaan atau di kawasan perkotaan. Hampir di setiap Kabupaten/Kota yang ada

di Indonesia selalu dihadapkan dengan permasalahan sampah seperti misalnya Ibu Kota Jakarta 7.000 Ton per hari. Kota Bandung 1.600 Ton per hari (sumber: beritasatu.com). Bertambahnya jumlah penduduk tiap tahun diperkirakan mencapai 3,6 juta jiwa dan perubahan pola konsumsi masyarakat yang tinggi telah menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah.

Pertumbuhan Penduduk di Pulau Nunukan cukup signifikan dari tahun ke tahun mencapai 11,57% sejalan dengan peningkatan aktivitas perekonomian serta adanya pemekaran wilayah dari Desa menjadi Kecamatan. Menurut data Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan pada tahun 2015 dengan jumlah penduduk Kabupaten Nunukan sebesar 524.478 jiwa menghasilkan sampah sebesar 376,62 m<sup>3</sup>/hari (204 ton/hari). Dengan volume sampah sebesar itu jika tidak dilakukan dengan manajemen pengelolaan sampah yang baik maka akan mengalami penurunan kualitas lingkungan hidup.

Sampah domestik ini terdiri dari sampah organik dan sampah non organik. Sampah organik berasal dari makhluk hidup yang dapat terdegradasi sedangkan sampah non organik yang tidak dapat terdegradasi misalnya: plastik, kaleng, kaca, dan lain-lain. Selain sampah organik dan sampah non organik terdapat juga sampah lain yang disebut dengan sampah berbahaya misalnya: baterai, jarum suntik, dan lain-lain. Sementara sampah industri terdiri dari emisi dari proses pembakaran, limbah cair (sampah cair), limbah padat (sampah padat).

Volume sampah dan jenis yang dihasilkan tergantung dari pola konsumsi suatu masyarakat dalam suatu wilayah. Semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat tersebut maka semakin tinggi pula volume sampah yang dihasilkan dan semakin banyak jenis sampah yang dihasilkan. Akan tetapi pada umumnya

sebagian besar sampah yang di hasilkan oleh rumah tangga adalah jenis sampah organik (sampah basah), yaitu mencakup 60-70% dari total volume sampah (Kementerian Lingkungan Hidup, 2008)

Pengelolaan persampahan di Kabupaten Nunukan merupakan suatu sistem yang saling berinteraksi antara Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran dengan masyarakat yang membentuk suatu kesatuan dan mempunyai tujuan. Pengolahan sampah di Kabupaten Nunukan bertujuan untuk melayani penduduk terhadap sampah domestik rumah tangga yang dihasilkannya secara tidak langsung memelihara kesehatan masyarakat serta menciptakan suatu lingkungan yang baik, bersih dan sehat. Sampah padat dari pemukiman merupakan bagian terbesar dari sampah yang timbul di Kabupaten Nunukan.

Pemerintah Kabupaten Nunukan bertanggung jawab dalam pengumpulan ulang dan pembuangan sampah dari pemukiman secara memadai. Namun karena terdapat hal lain yang harus diprioritaskan dalam pembangunan di daerah serta kurangnya dana penunjang untuk operasional pengolahan persampahan, menjadikan pada beberapa daerah kegiatan pengolahan sampah ini tidak seperti yang diharapkan. Hal ini makin diperkuat dengan belum diterapkannya prinsip bahwa yang memproduksi barang harus mengelola sampah dari barang tersebut.

Di sisi lain, masyarakat juga bertanggung jawab dalam membuang sampahnya secara benar pada suatu tempat pengumpulan dan diharapkan dapat mengelola persampahan secara mandiri dan terpadu atau dapat juga suatu kelompok masyarakat untuk menjalin kerjasama dengan pemerintah dalam pengelolaan persampahan terpadu. Pada sisi lain sampah yang berasal dari

pemukiman, pasar, taman, dan lain-lain, jika tidak dikelola secara baik, keberadaannya sering menimbulkan masalah bagi lingkungan, seperti:

1. Sampah yang tidak teratasi dengan baik dapat menyebabkan lingkungan tidak baik secara estetika.
2. Sampah yang membusuk menghasilkan gas yang berbau yang tidak sedap dan berbahaya bagi kesehatan, air yang dikeluarkan (*leachate*) juga dapat menyebabkan pencemaran sungai, maupun air tanah.
3. Sampah yang tercecer tidak pada tempatnya dapat menyebabkan tersumbatnya saluran *drainase* sehingga dapat menimbulkan banjir.
4. Kawasan yang padat penduduknya seperti kota besar akan kesulitan mencari lahan baru untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Menurut Slamet (1994:64), ada beberapa faktor yang penting yang mempengaruhi terjadinya sampah yaitu: jumlah penduduk, keadaan sosial, kemajuan Teknologi yang akan menambah jumlah maupun kualitas sampah. Pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan akan:

1. Mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA sehingga dapat memperpanjang umur tempat pembuangan akhir (TPA), meningkatkan efisiensi biaya pengangkutan sampah, meningkatnya kondisi sanitasi di sekitar TPA.
2. Mengurangi pencemaran lingkungan dan meningkatkan kebersihan lingkungan.
3. Membantu melestarikan sumberdaya alam, terutama kompos yang dipakai untuk pupuk tanaman.
4. Menghasilkan sumberdaya baru dari sampah, misalnya pupuk tanaman.
5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Kabupaten Nunukan sebagaimana juga dengan daerah lain yang ada di Indonesia juga mempunyai permasalahan yang umum terjadi dalam hal pengelolaan persampahan. Masalah yang sering muncul dalam penanganan

sampah adalah masalah biaya operasional yang tinggi. Sebagai akibat biaya operasional yang tinggi, kebanyakan daerah-daerah di Indonesia hanya mampu mengumpulkan dan membuang 60-70% dari seluruh produksi sampahnya (Kementerian Lingkungan Hidup, 2015).

Manajemen pengelolaan persampahan di Kabupaten Nunukan masih belum efektif, contoh yang dapat dilihat adalah pengangkutan sampah kota yang belum maksimal, karena terkadang 2 sampai 3 hari bahkan lebih sampah tidak terangkut sehingga bau yang menyengat mengganggu pengguna jalan raya. Hal ini dikarenakan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya. Demikian juga halnya dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih minim sehingga pengelolaan sampah menjadi tidak optimal.

Belum lagi jumlah armada pengangkutan sampah yang ada khususnya jenis *DumpTruck* milik Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran (DKPPK) Kabupaten Nunukan sebanyak 12 unit yang masih beroperasi dirasa belum mencukupi untuk mengangkut volume sampah, untuk pengangkutan di gang-gang menggunakan Motor Gandeng sebanyak 12 unit, dan ada penambahan 5 unit namun diperuntukkan di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Sei Bilal.

Volume sampah yang ditangani oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan pada tahun 2015 mencapai 367,62 M<sup>3</sup>/hari. Jenis Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang digunakan di Kabupaten Nunukan sangat bervariasi jenisnya mulai dari karet, plastik, beton, semi kontainer, gerobak, kontainer, dan semi kontainer baru, dan sebagian tidak dilengkapi dengan penutup sehingga menimbulkan bau busuk.

Kondisi pengangkutan sampah yang ada saat ini, menggunakan pola individual langsung (*door to door*) yaitu dimulai dari sumber sampah yang dikumpulkan di depan rumah penduduk dalam kantong plastik, keranjang, karung serta pengumpulan di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang disediakan sepanjang ruas jalan kota. Permasalahan lainnya yang terjadi yaitu sebagian besar sampah belum terpilah antara organik dan an-organik, demikian juga dengan kendaraan pengangkut sampah masih ada menggunakan *dump truck* terbuka tanpa penutup di atasnya yang menyebabkan sampah tercecer dan polusi pada lokasi yang dilalui selama menuju ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Jarak dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan pusat kota sekitar  $\pm$  20 Km menuju Selatan, kondisi ini juga yang menyebabkan kebutuhan akan Bahan Bakar Minyak sangat tinggi sementara ketersediaan Bahan Bakar Minyak semakin langka, belum lagi kendaraan saat ini sebagian ada yang sudah mulai rusak karena kondisinya sudah terlalu lama sehingga perawatannya cukup mahal. kurangnya Sumber Daya Manusia yang bersedia melakukan pekerjaan tersebut yang menyebabkan sampah tidak tertangani dengan baik.

Berdasarkan kondisi yang ada sekarang, maka perlu dilakukan pengkajian secara lebih mendalam terhadap efektivitas manajemen persampahan pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan pengkajian secara lebih mendalam mengenai permasalahan tersebut.

## **B. Perumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas manajemen persampahan pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas manajemen persampahan pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun kegunaan dari penelitian ini secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

### **1. Secara Teoritis**

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang manajemen persampahan pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara sehingga dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi pihak lain yang teraik meneliti permasalahan yang sama namun pada waktu dan lokasi yang berbeda.

## 2. Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi dan bahan masukan bagi pemerintahan Kabupaten Nunukan, khususnya Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan untuk memperbaiki manajemen persampahan di Kabupaten Nunukan sehingga lebih baik lagi.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Dibawah ini penulis akan mengemukakan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian penulis. Adapun beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian penulis mengenai manajemen pengelolaan sampah di Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Rika Pratiwi Wulandari, Ellya Noryadi, dan Dian Prima Safitri (2014) yang berjudul Manajemen Pengelolaan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) Ganet pada kantor Dinas Tata Kota Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Tanjungpinang. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa manajemen pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) Ganet Tanjungpinang belum berjalan optimal karena belum adanya pemanfaatan gas metan, dan belum adanya pemanfaatan air lindi dengan menggunakan airase. Hal-hal yang menjadi penghambat dalam pengelolaan sampah antara lain faktor Sumber Daya Manusia, serta sarana dan prasarana yang masih belum tersedia sesuai dengan kebutuhan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Mayun Nadiasa, Dewa Ketut Sudarsana, dan I Nyoman Yasmara (2009), yang berjudul Manajemen Pengangkutan Sampah di Kota Amlapura. Hasil penelitian menemukan bahwa sistem pengangkutan yang dipilih untuk kendaraan *compactor truck* adalah pola pengangkutan dengan sistem kontainer tetap sedangkan untuk

kendaraan *arm roll truck* adalah pola pengangkutan dengan sistem pengosongan kontainer. Jumlah alat angkut yang diperlukan guna merealisasikan pengangkutan sampah di Kota Amlapura yaitu 4 unit *compactor truck* untuk mengangkut sampah organik dan 3 unit *compactor truck* untuk mengangkut sampah anorganik, serta 1 unit *arm roll* untuk sampah organik dan anorganik dengan waktu pengangkutan sampah selama 6 jam per hari. Jumlah TPS yang diperlukan adalah berupa bin kontainer dengan kapasitas 0,36 m<sup>3</sup> yaitu 213 unit TPS organik dan 137 unit TPS anorganik sedangkan untuk TPS berupa kontainer dengan kapasitas 4 m<sup>3</sup> yaitu 5 unit TPS organik dan 3 unit TPS anorganik.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Nurul Chusna Nasution (2013), yang berjudul Manajemen Pengelolaan Sampah di Kota Bandar Lampung (Studi Pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung). Berdasarkan hasil penelitian ada 4 fungsi manajemen sebagai pelaksanaan manajemen pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung yaitu *planning*, *organizing*, *actuating* dan *controlling*. *Planning* yang dibuat oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota di Bandar Lampung yaitu memperbaiki sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah dan tahun 2014 akan dibentuk satgas (satuan tugas) atau patroli sampah. Selanjutnya dari aspek *organizing* yang dilakukan bekerja sama dengan Dinas lain dalam pengelolaan sampah, walaupun sudah ada penambahan tenaga kontrak namun dari jumlah personil masih minim. Dari segi *actuating* adalah adanya pemberian motivasi kepada bawahan sebagai upaya untuk meningkatkan semangat kerja dan melaksanakan tugasnya demi tercapainya tujuan.

*Controlling* yang dilakukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung belum berjalan dengan maksimal, masih banyaknya petugas di lapangan yang kurang serius dalam menjalankan tugasnya. Faktor-faktor penyebab manajemen pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung belum berjalan optimal karena dalam pengembangan dan peningkatan aspek pelayanan masih dengan menggunakan sistem *open dumping* (membuang langsung ke TPA) yang sangat membahayakan baik dari segi lingkungan maupun dari segi kesehatan manusia. Kemudian dari peran serta masyarakat masih terlihat minim, dimana perilaku masyarakat sulit diubah dan kurangnya kesadaran akan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan. Selanjutnya pengaturan tentang pengelolaan sampah belum dibentuknya Peraturan Daerah atau Peraturan Walikota, selama ini acuannya yaitu UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Berdasarkan uraian di atas, maka persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama menggunakan fungsi manajemen menurut Terry dan metode penelitian deskriptif kualitatif, sedangkan perbedaannya terletak pada lokus dan focus penelitian. Penelitian pertama lebih menekankan pada pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), penelitian kedua lebih memfokuskan penelitiannya pada manajemen pengangkutan sampah, dan penelitian ketiga lebih memfokuskan penelitiannya pada fungsi-fungsi manajemen. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih menekankan pada efektivitas manajemen pengelolaan sampah.

## B. Kajian Teori

### 1. Konsep Kebijakan Publik

Istilah kebijakan atau "*policy*" biasanya digunakan untuk menunjuk perilaku seseorang atau sejumlah aktor dalam suatu bidang tertentu (misalnya: pejabat, suatu kelompok, lembaga pemerintah). Dunn (2000:51-52), menjelaskan bahwa secara etimologis istilah kebijakan (*policy*) berasal dari bahasa Yunani, Sanskerta dan Latin. Akar kata dalam bahasa Yunani dan Sanskerta *polis* (negara-kota) dan *pur* (kota) yang dikembangkan dalam bahasa latin menjadi *poliria* (negara) dan akhirnya dalam bahasa Inggris *policie*, yang berarti menangani masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan.

Jones dalam Winarno (2002:14), menjelaskan istilah kebijakan (*policy term*) digunakan dalam praktik sehari-hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Istilah ini sering dipertukarkan dengan tujuan (*goals*), program, keputusan (*decisions*), standar, proposal dan *grand design*. Richard Rose dalam Winarno (2002:15-16) menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai "serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekwensi-konsekwensinya bagi mereka yang bersangkutan dari pada sebagai suatu keputusan sendiri".

Carl Friedrich dalam Wahab (2008:3) memandang kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk

mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Sejalan dengan Anderson dalam Wahab (2008:03) Secara umum merumuskan kebijakan sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi.

Anderson dalam Winamo (2002:16-18) merumuskan bahwa “kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi masalah atau suatu persoalan”. Konsep kebijakan ini mempunyai implikasi yaitu: (1) titik perhatian dalam membicarakan kebijakan berorientasi pada maksud dan tujuan, bukan suatu yang terjadi begitu saja melainkan sudah direncanakan oleh aktor-aktor yang terlihat dalam sistem politik, (2) suatu kebijakan yang tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan berbagai kebijakan lainnya di dalam masyarakat, (3) kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan pemerintah dan bukan apa yang diinginkan pemerintah, (4) kebijakan mungkin dalam bentuknya bersifat positif dan atau negatif. Secara positif kebijakan mungkin mencakup bentuk tindakan pemerintah yang jelas untuk mempengaruhi suatu masalah tertentu. Secara negatif, kebijakan mungkin mencakup suatu keputusan oleh pejabat pemerintah, tetapi tidak untuk mengambil tindakan dan atau tidak untuk melakukan sesuatu mengenai suatu persoalan yang memerlukan keterlibatan pemerintah, (5) Kebijakan harus berdasarkan hukum sehingga memiliki kewenangan masyarakat untuk mematuhi.

Sedangkan untuk istilah kebijakan publik, banyak sekali pengertian yang telah diungkapkan oleh pakar. Konsep kebijakan publik (*public policy*) adalah sebagai suatu proses yang mengandung berbagai pola aktivitas tertentu dan merupakan seperangkat keputusan yang bersangkutan dengan tindakan untuk mencapai tujuan dalam beberapa cara yang khusus. Sehingga dengan demikian, maka konsep kebijakan publik berhubungan dengan tujuan dengan pola aktivitas pemerintahan mengenai sejumlah masalah serta mengandung tujuan.

Winarno (2002:16), menjelaskan sifat kebijakan publik sebagai arah tindakan dapat dipahami secara lebih baik bila konsep ini dirinci menjadi beberapa kategori yaitu:

- a. Tuntutan-tuntutan kebijakan (*policy demands*) adalah tuntutan-tuntutan-tuntutan yang dibuat oleh aktor-aktor swasta atau pemerintah, ditujukan pada pejabat-pejabat pemerintah dalam suatu sistem politik.
- b. Keputusan-keputusan kebijakan (*policy decisions*) didefinisikan sebagai keputusan-keputusan yang dibuat oleh pejabat-pejabat pemerintah yang mengesahkan atau memberikan arah dan substansi kepada tindakan-tindakan kebijakan publik. Termasuk dalam kegiatan ini adalah menetapkan undang-undang memberikan perintah-perintah eksekutif atau pernyataan-pernyataan resmi, mengumumkan peraturan-peraturan administratif atau membuat interpretasi yuridis terhadap undang-undang.
- c. Pernyataan-pernyataan kebijakan (*policy statement*) adalah pernyataan-pernyataan resmi dan artikulasi artikulasi kebijakan publik. Yang termasuk dalam kategori ini adalah undang-undang legislatif, perintah-perintah dan dekrit presiden, peraturan-peraturan, peraturan-peraturan administratif dan pengadilan, maupun pernyataan-pernyataan atau pidato-pidato pejabat-pejabat pemerintah yang menunjukkan maksud dan tujuan pemerintah dan apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Hasil-hasil kebijakan lebih merujuk pada "manifestasi nyata" dari kebijakan-kebijakan publik. hal-hal yang sebenarnya dilakukan menurut keputusan-keputusan dan pernyataan-pernyataan kebijakan.
- d. Dampak-dampak kebijakan (*outcomes*) lebih merujuk pada akibat-akibatnya bagi masyarakat baik yang diinginkan yang atau tidak

diinginkan yang berasal dari tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah.

Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan public merupakan serangkaian tindakan yang menjadi keputusan pemerintah untuk melakukan sesuatu yang bertujuan untuk memecahkan masalah demi kepentingan masyarakat umum.

## 2. Konsep Pelayanan Publik

Berkaitan dengan pelayanan, ada dua istilah yang perlu diketahui, yaitu melayani dan pelayanan. Pengertian melayani adalah membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan seseorang sedangkan pengertian pelayanan adalah Usaha melayani kebutuhan orang lain (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

Menurut Wasistiono dalam Sagita (2010:54), pelayanan adalah pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Menurut S. Lukman dalam Sagita (2010:54), pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan.

Menurut Batinggi (2005:65), disebut pelayanan umum lahir karena adanya kepentingan umum. Pelayanan umum bukanlah tujuan, melainkan suatu proses untuk mencapai sasaran tertentu yang ditetapkan. Pelayanan menurut Batinggi (2005:66) terdiri atas empat faktor, yaitu:

- a. Sistem, prosedur, metode.

- b. Personal, terutama ditekankan pada perilaku aparatur.
- c. Sarana dan prasarana.
- d. Masyarakat sebagai pelanggan.

Menurut Gronroos dalam Ratminto dan Winarsih (2012:34), ia mengatakan bahwa pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen atau pelanggan.

Menurut Moenir dalam Tangkilisan (2005:64), pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. Pelayanan yang diperlukan manusia pada dasarnya ada dua jenis, yaitu layanan fisik yang sifatnya pribadi sebagai manusia dan layanan administratif yang diberikan oleh orang lain selaku anggota organisasi, baik itu organisasi massa atau negara.

Jadi, berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan adalah usaha untuk melayani kebutuhan orang lain. Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Penyelenggaraan pelayanan publik adalah instansi pemerintah.

Pemberi pelayanan publik adalah pegawai instansi pemerintah yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penerima pelayanan publik adalah orang, masyarakat, instansi pemerintah dan badan hukum yang menerima pelayanan dari instansi pemerintah.

Tujuan dari pelayanan publik adalah memuaskan keinginan masyarakat atau pelanggan pada umumnya. Untuk mencapai hal ini diperlukan kualitas pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Kualitas pelayanan adalah kesesuaian antara harapan dan kenyataan. Hakikat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat.

### 3. Konsep Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat Emerson yang dikutip Handayani (1994:16), bahwa: "Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya".

Sedangkan menurut Georgopolous dan Tannembaum (1985:50), mengemukakan bahwa:

“Efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan, dimana keberhasilan suatu organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi juga mekanisme mempertahankan diri dalam mengejar sasaran. Dengan kata lain, penilaian efektivitas harus berkaitan dengan masalah sasaran maupun tujuan”.

Selanjutnya Steers (1985:87), mengemukakan bahwa:

“Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarnya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya”.

Lebih lanjut menurut Kurniawan (2005:109), mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: “Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya”.

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan pendapat Hidayat (1986:75), bahwa: “Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya”.

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini efektivitas

merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (*input*), proses, maupun keluaran (*output*). Sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah hal yang sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Dari sudut produktivitas, seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (*output*) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh Siagian (1978:77), yaitu:

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah "pada jalan" yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.

- d. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
- e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
- h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

Ada tiga pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas suatu organisasi, yang dikemukakan oleh Martani dan Lubis (1987:55), yakni:

- a. Pendekatan Sumber (*resource approach*) yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- b. Pendekatan proses (*process approach*) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.
- c. Pendekatan sasaran (*goals approach*) dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) yang sesuai dengan rencana.

Selanjutnya Steers dalam Tangkilisan (2005:141), mengemukakan 5 (lima) kriteria dalam pengukuran efektivitas, yaitu:

- a. Produktivitas
- b. Kemampuan adaptasi kerja
- c. Kepuasan kerja
- d. Kemampuan berlabar
- e. Pencarian sumber daya

Sedangkan Duncan yang dikutip Steers (1985:53), mengatakan ukuran efektivitas adalah sebagai berikut:

- a. **Pencapaian Tujuan**  
Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkret.
- b. **Integrasi**  
Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.
- c. **Adaptasi**  
Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

#### 4. Konsep Manajemen

Dalam suatu organisasi diperlukan manajemen untuk mengatur semua proses penyelenggaraan organisasi hingga tercapainya tujuan organisasi. Pada instansi pemerintah khususnya menyangkut soal pelayanan publik, diperlukan manajemen yang efektif dan efisien dalam proses penyelenggaraan pelayanan agar tercapainya tujuan dari pelayanan itu sendiri yakni kepuasan masyarakat.

Kata manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno *ménagement*, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Selain itu juga, manajemen berasal dari bahasa Inggris yaitu *management* berasal dari kata *manage* menurut kamus Oxford yang artinya memimpin atau membuat keputusan di dalam suatu organisasi. Istilah manajemen yang diterjemahkan dari kata *manage* memang biasanya dikaitkan dengan suatu tindakan yang mengatur sekelompok orang di dalam organisasi atau lembaga tertentu demi mencapai tujuan-tujuan tertentu.

Menurut T. Hani Handoko (2000:10), mengatakan bahwa "Manajemen adalah bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan, dan mencapai tujuantujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan, kepemimpinan dan pengawasan. Menurut Mulyu S. P. Hasibuan (2011:2) "Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai satu tujuan.

Menurut Ricky W. Griffin dalam Ladzi Safroni (2012:47) mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran (*goals*) secara efektif dan efisien. Sementara menurut Kosasih dan Soewedo (2009:1), "Manajemen adalah pengarahan menggerakkan sekelompok orang dan fasilitas dalam usaha untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Terry dalam Hasibuan (2011:2), manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau peggarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Hal tersebut meliputi pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan, menetapkan cara bagaimana melakukannya, memahami bagaimana mereka harus melakukannya dan mengukur efektivitas dari usaha-usaha yang telah dilakukan.

Menurut Robbins dan Coulter dalam Hasibuan (2011:3), mengatakan bahwa manajemen adalah proses pengoordinasian kegiatan-kegiatan

pekerjaan sehingga pekerjaan tersebut terselesaikan secara efisien dan efektif dengan dan melalui orang lain. Sedangkan menurut Assauri (2004:3), "pengertian manajemen adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan atau mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan orang lain".

Follet dalam Wijayanti (2008:1), mengartikan manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Sementara menurut Stoner yang dikutip oleh Wijayanti (2008:1), manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya manusia organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Gulick dalam Wijayanti (2008:1) mendefinisikan manajemen sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan (*science*) yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem ini lebih bermanfaat bagi kemanusiaan.

Schein dalam Wijayanti (2008:2) memberi definisi manajemen sebagai profesi. Menurutnya manajemen merupakan suatu profesi yang dituntut untuk bekerja secara profesional, karakteristiknya adalah para professional membuat keputusan berdasarkan prinsip-prinsip umum, para professional mendapatkan status mereka karena mereka mencapai standar prestasi kerja tertentu, dan para profesional harus ditentukan suatu kode etik yang kuat.

Menurut Manulang dalam Ratminto dan Winarsih (2012:1), mendefinisikan manajemen sebagai suatu seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, penyusunan dan pengawasan daripada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

Sedangkan menurut Stoner dan Freeman dalam Safroni (2012:44), manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan proses penggunaan semua sumber daya organisasi untuk tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Dari beberapa definisi yang tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan usaha yang dilakukan secara bersama-sama untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Manajemen merupakan sebuah kegiatan, pelaksanaannya disebut *manajing* dan orang yang melakukannya disebut *manajer*.

Manajemen dibutuhkan setidaknya untuk mencapai tujuan, menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan, dan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Manajemen terdiri dari berbagai unsur, yakni *man* (sumber daya manusia), *money* (uang yang diperlukan untuk mencapai tujuan), *method* (cara atau sistem untuk mencapai tujuan), *machine* (mesin atau alat untuk berproduksi), *market* (pasaran atau tempat untuk melemparkan hasil produksi), *material* (bahan-bahan yang diperlukan

dalam kegiatan) dan *information* (hal-hal yang dapat membantu untuk mencapai tujuan).

Fungsi-fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Namun terdapat perbedaan pandangan mengenai fungsi-fungsi manajemen oleh beberapa ahli.

Menurut Henry Fayol dalam Hasibuan (2011:38), mengatakan bahwa fungsi manajemen adalah sebagai berikut:

- a. *Planning*  
Perencanaan (*planning*) adalah fungsi dasar (fundamental) manajemen, karena pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dan pengendalian pun harus terlebih dahulu direncanakan. Perencanaan ini dinamis artinya dapat dirubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi pada saat itu. Perencanaan ini ditujukan pada masa depan yang penuh dengan ketidakpastian, karena adanya perubahan kondisi dan situasi, sedangkan hasil dari perencanaan akan diketahui pada masa depan.
- b. *Organizing*  
Fungsi pengorganisasian yang dalam bahasa inggrisnya adalah *organizing* berasal dari kata *organize* yang berarti menciptakan struktur dengan bagian-bagian yang diintegrasikan sedemikian rupa, sehingga hubungannya satu sama lain terikat oleh hubungan terhadap keseluruhannya. Pengorganisasian merupakan fungsi manajemen dan suatu proses yang dinamis, sedangkan organisasi merupakan alat atau wadah yang statis. Pengorganisasian dapat diartikan penentuan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan, pengelompokkan tugas-tugas dan membagi-bagikan pekerjaan kepada setiap karyawan, penetapan departemen-departemen (sub sistem) dan penentuan hubungan-hubungan.
- c. *Commanding*  
Fungsi pengarahan (*commanding*) merupakan fungsi terpenting dan paling dominan dalam proses manajemen. Fungsi ini baru dapat diterapkan setelah rencana, organisasi, dan karyawan ada. Jika fungsi ini diterapkan maka proses manajemen dalam merealisasi tujuan dimulai. Namun, penerapan fungsi ini sangat sulit, rumit dan kompleks karena keinginan karyawan tidak dapat dipenuhi sepenuhnya. Hal ini disebabkan karena karyawan adalah makhluk hidup yang punya pikiran, perasaan, harga diri, cita-cita dan lain-lainnya.
- d. *Coordinating*

Setelah dilakukan pendelegasian wewenang dan pembagian pekerjaan kepada para karyawan oleh manajer, langkah selanjutnya adalah pengkoordinasian. Setiap bawahan mengerjakan hanya sebagian dari pekerjaan perusahaan, karena itu masing-masing pekerjaan bawahan harus disatukan, diintegrasikan, dan diarahkan untuk mencapai tujuan. Tanpa koordinasi tugas dan pekerjaan dari setiap individu karyawan maka tujuan perusahaan tidak akan tercapai. Koordinasi itu sangat penting di dalam suatu organisasi.

e. *Controlling*

Fungsi pengendalian (*controlling*) adalah fungsi terakhir dari proses manajemen. Fungsi ini sangat penting dan sangat menentukan pelaksanaan proses manajemen, karena itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Pengendalian ini berkaitan erat dengan fungsi perencanaan dan kedua fungsi ini merupakan hal yang saling mengisi.

Kemudian menurut G.R. Terry dalam Hasibuan (2011:38), fungsi manajemen adalah sebagai berikut:

a. *Planning*

*Planning* (perencanaan) ialah penetapan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan. *Planning* mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk dalam pemilihan alternatif-alternatif keputusan. Diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualisasi dan melihat ke depan guna merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan untuk masa mendatang.

b. *Organizing*

*Organizing* berasal dari kata *organon* dalam bahasa Yunani yang berarti alat, yaitu proses pengelompokan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan dan penugasan setiap kelompok kepada seorang manajer. Pengorganisasian dilakukan untuk menghimpun dan mengatur semua sumber-sumber yang diperlukan, termasuk manusia, sehingga pekerjaan yang dikehendaki dapat dilaksanakan dengan berhasil.

c. *Actuating*

Pelaksanaan merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa, hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan bersama.

d. *Controlling*

*Controlling* atau pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan alat untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Sementara menurut Harold Koonts dan Cyril O'Donnel dalam Hasibuan (2011:38), fungsi-fungsi manajemen terdiri dari:

- a. *Planning*
- b. *Organizing*
- c. *Staffing*
- d. *Directing*
- e. *Controlling*

Adapun menurut Sondang P. Siagian dalam Hasibuan (2011:38), fungsi-fungsi manajemen terdiri dari:

- a. *Planning*
- b. *Organizing*
- c. *Motivating*
- d. *Controlling*
- e. *Evaluation*

Dari perbandingan beberapa fungsi-fungsi manajemen di atas, dapat dipahami bahwa semua manajemen diawali dengan perencanaan (*Planning*) karena perencanaan yang akan menentukan tindakan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Setelah perencanaan adalah pengorganisasian (*organizing*). Hampir semua ahli menempatkan pengorganisasian diposisi kedua setelah perencanaan. Pengorganisasian merupakan pembagian kerja dan sangat berkaitan erat dengan fungsi perencanaan karena pengorganisasian pun harus direncanakan. Selanjutnya setelah menerapkan fungsi perencanaan dan pengorganisasian adalah menerapkan fungsi pengarahan yang diartikan dalam kata yang berbeda-beda seperti *actuating*, *leading*, dan *commanding*, tetapi mempunyai tujuan yang sama yaitu mengarahkan semua karyawan agar mau bekerjasama dan bekerja efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Tetapi juga ada penambahan fungsi pengkoordinasian (*coordinating*) setelah fungsi pengarahan. Fungsi pengkoordinasian untuk mengatur karyawan agar dapat saling bekerjasama sehingga terhindar dari kekacauan, percekocokan dan

kekosongan pekerjaan. Selanjutnya fungsi terakhir dalam proses manajemen adalah pengendalian (*controlling*).

Pada dasarnya fungsi-fungsi ini harus dilaksanakan dengan baik secara berurutan supaya proses manajemen itu diterapkan secara baik. Dari perbandingan beberapa fungsi-fungsi manajemen di atas, dapat dipahami bahwa semua manajemen diawali dengan perencanaan (*planning*) karena perencanaan yang akan menentukan tindakan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Setelah perencanaan adalah pengorganisasian (*organizing*).

Pada fungsi manajemen ini, peneliti lebih cenderung memakai fungsi manajemen menurut George R. Terry untuk menjawab penelitian mengenai manajemen persampahan pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara.

## **5. Manajemen Pengelolaan Sampah**

Sampah pada dasarnya merupakan suatu bahan yang terbuang atau di buang dari suatu sumber hasil aktivitas manusia maupun proses-proses alam yang tidak mempunyai nilai ekonomi, bahkan dapat mempunyai nilai ekonomi yang negatif karena dalam penanganannya baik untuk membuang atau membersihkannya memerlukan biaya yang cukup besar.

Sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pembikinan atau pemakaian barang rusak atau bercacat dalam pembikinan manufktur atau materi berkelebihan atau ditolak atau buangan (Kementerian Lingkungan Hidup, 2005). Dalam Undang-Undang No. 18 tentang Pengelolaan Sampah dinyatakan bahwa

definisi sampah yaitu sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat.

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah (Kementrian Lingkungan Hidup, 2007). Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis (Suprihatin, 1999:72). Sementara itu Radyastuti (dalam Suprihatin, 1999:73) menyatakan bahwa sampah adalah sumberdaya yang tidak siap pakai.

Sampah adalah sesuatu yang tidak berguna lagi, dibuang oleh pemiliknya atau pemakai semula (Tandjung dalam Suprihatin, 1999:73). Pemerintah bertanggung jawab dalam pengumpulan ulang dan penbuangan sampah dari pemukiman secara memadai. Namun karena terdapat hal lain yang harus diprioritaskan dalam pembangunan di daerah serta kurangnya dana penunjang untuk operasionalisasi pengelolaan persampahan, menjadikan pada beberapa daerah kegiatan pengelolaan sampah ini tidak seperti yang diharapkan.

Hal ini makin diperkuat dengan belum diterapkannya prinsip bahwa yang memproduksi barang harus mengelola sampah dari barang tersebut. Beberapa kondisi umum yang terjadi dalam pelaksanaan pengelolaan sampah selama ini, di mana sampah rumah tangga oleh masyarakat dikumpulkan dan dibuang ke sebuah tempat pembuangan atau kontainer yang disediakan oleh pemerintah. Dari sini sampah diangkut oleh truk ke *landfill* yang umumnya

kurang terkontrol, dimana para pemulung mencari barang-barang yang dapat didaur ulang.

Keberadaan sampah dalam jumlah yang banyak jika tidak dikelola secara baik dan benar, maka akan menimbulkan gangguan dan dampak terhadap lingkungan, baik dampak terhadap komponen fisik kimia (kualitas air dan udara), biologi, sosial ekonomi, budaya dan kesehatan lingkungan. Dampak operasional Tempat Pembuangan Akhir (TPA) terhadap lingkungan akan memicu terjadinya konflik sosial antar komponen masyarakat. Pada tahap pembuangan akhir/pengolahan, sampah akan mengalami pemrosesan baik secara fisik, kimia maupun biologis sedemikian hingga tuntas penyelesaian seluruh proses.

Sidik *et al* (1985:74), mengemukakan bahwa dua proses pembuangan akhir, yakni: *open dumping* (penimbunan secara terbuka) dan *sanitary landfill* (pembuangan secara sehat). Pada sistem *open dumping*, sampah ditimbun di areal tertentu tanpa membutuhkan tanah penutup, sedangkan pada cara *sanitary landfill*, sampah ditimbun secara berselang-seling antara lapisan sampah dan lapisan tanah sebagai penutup. Dalam Draf Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Sampah oleh *Japan International Cooperation Agency* (JICA) disebut bahwa proses *sanitary landfill* adalah pembuangan sampah yang didesain, dibangun, dioperasikan dan dipelihara dengan cara menggunakan pengendalian teknis terhadap potensi dampak lingkungan yang timbul dari pengembangan dan operasional fasilitas pengelolaan sampah (JICA 2005).

Metode *sanitary landfill* ini merupakan salah satu metoda pengolahan sampah terkontrol dengan sistem sanitasi yang baik. Sampah dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir. Kemudian sampah dipadatkan dengan traktor dan selanjutnya di tutup tanah, cara ini akan menghilangkan polusi udara. Pada bagian dasar tempat tersebut dilengkapi sistem saluran *leachate* yang berfungsi sebagai saluran limbah cair sampah atau ke lingkungan. Pada metode *sanitary landfill* tersebut juga dipasang pipa gas untuk mengalirkan gas hasil aktivitas penguraian sampah.

Dalam Undang-Undang No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, jenis sampah yang diatur adalah sebagai berikut:

- a. Sampah rumah tangga  
Yaitu sampah yang berbentuk padat yang berasal dari sisa kegiatan sehari-hari di rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik dan dari proses alam yang berasal dari lingkungan rumah tangga. Sampah ini bersumber dari rumah atau dari kompleks perumahan.
- b. Sampah sejenis sampah rumah tangga  
Yaitu sampah rumah tangga yang bersala bukan dari rumah tangga dan lingkungan rumah tangga melainkan berasal dari sumber lain seperti pasar, pusat perdagangan, kantor, sekolah, rumah sakit, rumah makan, hotel, terminal, pelabuhan, industri, taman kota, dan lainnya.
- c. Sampah spesifik  
Yaitu sampah rumah tangga atau sampah sejenis rumah tangga yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya memerlukan penanganan khusus, meliputi, sampah yang mengandung B3 (bahan berbahaya dan beracun seperti batere bekas, bekas toner, dan sebagainya), sampah yang mengandung limbah B3 (sampah medis), sampah akibat bencana, puing bongkaran, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah, sampah yang timbul secara periode (sampah hasil kerja bakti).

Mekanisme pengelolaan sampah dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah meliputi, kegiatan-kegiatan berikut:

- a. Pengurangan sampah, yaitu kegiatan untuk mengatasi timbulnya sampah sejak dari produsen sampah (rumah tangga, pasar, dan lainnya), mengguna ulang sampah dari sumbernya dan/atau di tempat pengolahan, dan daur ulang sampah di sumbernya dan atau di tempat

pengolahan. Kegiatan yang termasuk dalam pengurangan sampah ini adalah sebagai berikut:

- 1). Menetapkan sasaran pengurangan sampah
  - 2). Mengembangkan Teknologi bersih dan label produk
  - 3). Menggunakan bahan produksi yang dapat di daur ulang atau diguna ulang
  - 4). Fasilitas kegiatan guna atau daur ulang
  - 5). Mengembangkan kesadaran program guna ulang atau daur ulang
- b. Penanganan sampah, yaitu rangkaian kegiatan penanganan sampah yang mencakup pemilahan (pengelompokan dan pemisahan sampah menurut jenis dan sifatnya), pengumpulan (memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau tempat pengolahan sampah terpadu), pengangkutan (kegiatan memindahkan sampah dari sumber, TPS atau tempat pengolahan sampah terpadu, pengolahan hasil akhir (mengubah bentuk, komposisi, karakteristik dan jumlah sampah agar diproses lebih lanjut, dimanfaatkan atau dikembalikan alam dan pemrosesan aktif kegiatan pengolahan sampah atau residu hasil pengolahan sebelumnya agar dapat dikembalikan ke media lingkungan.

Dalam perencanaan pengelolaan sampah, Undang-Undang Pengelolaan Sampah mengharapkan Pemerintah Kota/Kabupaten dapat membentuk semacam forum pengelolaan sampah skala kota/kabupaten atau provinsi. Forum ini beranggotakan masyarakat secara umum, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, organisasi lingkungan/persampahan, pakar, badan usaha dan lainnya.

Hal-hal yang dapat difasilitasi forum adalah: memberikan usul, pertimbangan dan saran terhadap kinerja pengelolaan sampah, membantu merumuskan kebijakan pengelolaan sampah, memberikan saran dan dapat dalam penyelesaian sengketa persampahan. Sampai saat ini, belum ada kebijakan nasional mengenal persampahan itu sendiri masih bersifat sosialisasi. Melihat di perkotaan penanganan pengelolaan sampah sudah sangat mendesak, diharapkan UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dapat diimplementasikan.

Untuk pengelolaan sampah spesifik baik B3 (bahan berbahaya dan beracun) dan sampah medis yang bersifat infeksius mengenai pengelolaannya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Dalam sistem Pengelolaan Sampah Terpadu (PST) sebagai salah satu upaya pengelolaan Sampah Perkotaan adalah konsep rencana pengelolaan sampah perlu dibuat dengan tujuan mengembangkan suatu sistem pengelolaan sampah yang modern, dapat diandalkan dan efisien dengan teknologi yang ramah lingkungan. Dalam sistem tersebut harus dapat melayani seluruh penduduk, meningkatkan standar kesehatan masyarakat dan memberikan peluang bagi masyarakat dan pihak swasta untuk berpartisipasi aktif.

Pendekatan yang digunakan dalam konsep rencana pengelolaan sampah ini adalah meningkatkan sistem pengelolaan sampah yang dapat memenuhi tuntutan dalam pengelolaan sampah yang berbasis peran serta masyarakat. Aboejoewono (1999:54) menyatakan bahwa perlunya kebijakan pengelolaan sampah perkotaan yang ditetapkan di kota-kota di Indonesia meliputi 5 (lima) kegiatan, yaitu:

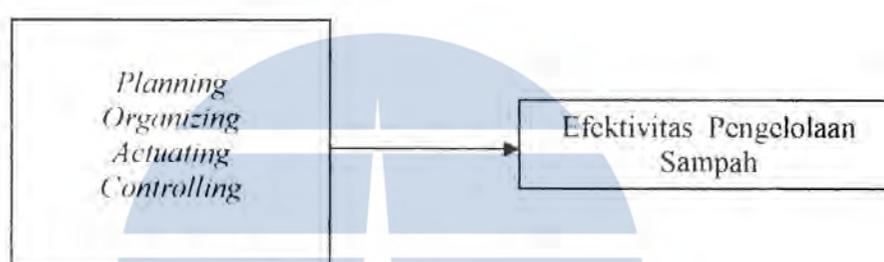
- a. Penerapan teknologi yang tepat guna
- b. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah
- c. Perlunya mekanisme keuntungan dalam pengelolaan sampah
- d. Optimalisasi TPA sampah

- e. Sistem kelembagaan pengelolaan sampah yang terintegrasi

### C. Kerangka Berpikir

Dari Uraian di atas, maka kerangka berfikir dalam penelitian ini, dapat digambarkan sebagai berikut :

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berpikir**



Sumber: Diadopsi dari Terry dalam Hasibuan (2011:38)

### D. Definisi Konseptual dan Operasional

Definisi konseptual dan operasional dari konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan sebelumnya. Semakin besar persentase target yang dicapai, maka makin tinggi efektivitasnya. Indikator dari efektivitas meliputi: kuantitas, kualitas dan waktu.

2. *Planning* atau perencanaan ialah penetapan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok orang untuk mencapai tujuan yang digariskan. Indikator dari perencanaan (*planning*) meliputi: perencanaan dalam pengelolaan sampah, penyusunan rencana kegiatan proses pengelolaan persampahan, bentuk dan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan, dan waktu pelaksanaan.
3. *Organizing* atau pengorganisasian yaitu proses pengelompokan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan dan penugasan setiap kelompok kepada seorang manajer. Indikator pengorganisasian (*organizing*) meliputi: tugas yang di berikan, ketersediaan SDM, ketersediaan peralatan kerja.
4. *Actuating* atau pelaksanaan merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa, hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan bersama. Indikator pelaksanaan (*actuating*) meliputi: pemberian pengarahan kepada pengawas dan petugas, pemberian pelatihan.
5. *Controlling* atau pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan alat untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Indikator pengawasan (*controlling*) meliputi: adanya pengawas, dan pengawasan di lapangan.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Desain Penelitian

Menurut Irawan (2007:4.21), “desain penelitian adalah rancangan (rencana) penelitian yang akan dilakukan oleh seorang peneliti. Desain penelitian mempunyai tiga komponen besar, yaitu permasalahan penelitian, kerangka teoritik dan metodologi”. Desain penelitian sangat penting sebab desain ini yang menentukan kualitas penelitian secara keseluruhan. Permasalahan penelitian adalah cara peneliti mengungkapkan apa yang ingin ia teliti. Permasalahan penelitian merupakan manifestasi atau perwujudan sesuatu yang mengusik dan mengganggu pikiran seorang peneliti, peneliti perlu jawaban untuk memuaskan hasrat ingin tahu yang mengganggu pikiran dan perasaannya itu.

Dalam kerangka teoritik, peneliti mulai mempertajam permasalahan penelitiannya ketahapan yang lebih bersifat ilmiah, dengan menggunakan konsep-konsep yang lebih jelas, teramat dan terukur. Sedangkan di dalam metodologi penelitian, mulai memikirkan bagaimana penelitian itu dilakukan dengan cara yang paling efektif dan efisien dan paling mampu membantunya menemukan kebenaran yang dicari. Sehingga dengan demikian terdapat hubungan yang erat antara permasalahan penelitian, kerangka teoritik dan metodologi penelitian. Ketiganya harus dipandang dan diperlakukan sebagai satu kesatuan yang integral. Jika berdiri sendiri-sendiri maka ketiganya tidak mempunyai makna apa-apa.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan jenis penelitiannya adalah penelitian deskriptif. Bogdan dan Taylor

dalam Moleong (2009:9), mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sementara menurut Irawan (2007:47), ia mengatakan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya dan memungkinkan peneliti melakukan pengkajian secara mendalam dan bukan hanya membuat “peta umum” dari objek penelitian tersebut.

### **B. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan**

Menurut Irawan (2007:426), penelitian kualitatif tidak mengenal populasi dan tidak pula sampel. Kalaupun kata sampel muncul dalam metode kualitatif maka sampel ini tidak bersifat mewakili populasi, tetapi lebih diperlakukan sebagai kasus yang mempunyai ciri khas tersendiri yang tidak harus sama dengan ciri populasi yang diwakilinya. Penelitian kualitatif adalah penelitian non populasi dan pengumpulan datanya dalam bentuk informan.

Menurut Mantra (2004:86), informan adalah orang yang dapat memberikan keterangan atau informasi mengenai masalah yang sedang diteliti dan dapat berperan sebagai narasumber selama proses penelitian. Adapun yang dijadikan informan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan.
2. Sekretaris Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan.

3. Kepala Bidang Kebersihan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan.
4. Kepala Seksi Penanganan Kebersihan Lingkungan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan

### C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini. Moleong (2009:17), menyatakan bahwa penelitian dengan metode kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan. Oleh karena itu yang menjadi instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, dan sekaligus berperan sebagai alat pengumpul data, selain itu ia juga menjadi segalanya dari keseluruhan proses penelitian disamping bantuan orang lain (narasumber).

Penggunaan peneliti sebagai instrumen penelitian bertujuan untuk mendapatkan data yang valid dan *reliable*, yang bisa dipenuhi melalui penelitian ke lapangan dan melakukan pengamatan serta wawancara dengan informan. Peneliti sebagai instrumen penelitian sebelum melakukan pengamatan di lapangan terlebih dahulu mempersiapkan dan membekali diri untuk melakukan pengamatan dan pengetahuan tentang *setting* dan *field* penelitian. Selanjutnya setelah peneliti melakukan persiapan tersebut dilanjutkan dengan penelitian utama yaitu melakukan wawancara dengan beberapa informan.

Instrumen bantu yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara. Narbuko dan Akhmadi (2007:83), menjelaskan tentang pengertian wawancara sebagai "proses tanya-jawab yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan langsung informasi-informasi

atau keterangan-keterangan". Pedoman wawancara berfungsi sebagai pengendali agar isi dari wawancara tidak kehilangan arah. Sedangkan teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah teknik wawancara mendalam (*indept interview*) dimana peneliti bertanya secara mendalam mengenai permasalahan yang di teliti kepada para informan yang telah ditentukan sebelumnya.

#### **D. Prosedur Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang relevan dan akurat mengenai masalah penelitian, yaitu:

1. Wawancara mendalam (*indept interview*), yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara mendalam dengan para informan yang dalam hal ini adalah Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan, Sekretaris Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan, Kepala Bidang Kebersihan, dan Kepala Seksi Penanganan Kebersihan Lingkungan. Metode wawancara dilakukan dalam rangka mendapatkan data primer dari informan dengan menggunakan pedoman wawancara.
2. Observasi partisipasi (*participant observation*), yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati dan terlibat secara langsung dengan aktivitas keseharian dari objek yang diteliti. Observasi dipergunakan untuk mengamati perilaku objek yang diteliti dalam melaksanakan pekerjaan, hubungan kerja, dan aktifitas lainnya selama melakukan pekerjaan.

3. Studi dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang ada di Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan, literatur-literatur, buku-buku bacaan, bulletin atau tulisan-tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

#### **E. Metode Analisis data**

Metode analisis data yang peneliti gunakan adalah metode analisis data deskriptif. Menurut Arikunto (2009:250), metode analisis deskriptif merupakan penelitian bukan eksperimen, karena tidak dimaksudkan untuk mengetahui akibat dari suatu perlakuan. Dengan penelitian deskriptif peneliti hanya bermaksud menggambarkan (mendeskripsikan) atau menerangkan gejala yang sedang terjadi.

Bogdan dalam Sugiyono (2008:88), menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Sementara Sugiyono (2008:89), berpendapat bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Metode analisis data dalam penelitian ini mengacu pada proses yang disarankan Irawan (2012:5.23), sebagai berikut:

1. Pengumpulan data mentah melalui wawancara terhadap *key informan*, kajian pustaka kemudian observasi langsung ke lapangan untuk menunjang penelitian yang dilakukan agar mendapatkan sumber data yang diharapkan.
2. Pembuatan transkrip data yaitu proses pemindahan data yang diperoleh dalam bentuk rekaman atau tulisan tangan menjadi catatan dalam bentuk tertulis dan terstruktur.
3. Pembuatan koding yaitu proses pemilihan dan pemusatan data yang telah ditranskrip dipilah pada bagian-bagian tertentu untuk menemukan hal-hal yang penting perlu dicatat sebagai kata kunci dan nantinya diberi kode.
4. Membuat kategorisasi data. Pada tahap ini data yang telah diberi kode sebelumnya dikelompokkan menurut jenisnya dan disederhanakan dengan cara mengikat konsep-konsep (kata kunci) dalam satu besaran yang disebut dengan istilah kategori.
5. Membuat kesimpulan sementara. Pada proses ini dari kategori data yang sudah dibuat ditarik kesimpulan sementara sehingga data yang diperoleh memiliki makna. Penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan di lapangan sehingga data-data dapat diuji validitasnya.
6. Triangulasi, yaitu proses pengecekan data dan membandingkan dengan data hasil pengamatan, wawancara, dokumen dan data lainnya yang relevan. Beberapa kesimpulan sementara dapat dipilah menjadi kategori-kategori yang lebih sederhana atau jika terdapat kategori yang memiliki makna yang berbeda maka dapat dimunculkan kategori baru dalam penyimpulan hasil penelitian.
7. Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan akhir dibuat merupakan reduksi dari hasil triangulasi dalam kata-kata yang lebih sederhana, general dan bermakna.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Objek Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Kabupaten Nunukan

Kabupaten Nunukan mempunyai luas wilayah 14.585,70 Km<sup>2</sup> dengan letak Geografisnya antara 115°22'30 BT sampai dengan 118°44'54 BT dan 3°30'00 sampai dengan 4°24'55' LU. Secara administratif Kabupaten Nunukan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara: berbatasan dengan Negara Bagian Sabah Malaysia.
- b. Sebelah Selatan: berbatasan dengan Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau.
- c. Sebelah Timur: berbatasan dengan Laut Sulawesi
- d. Sebelah Barat: berbatasan dengan Negara Bagian Serawak Malaysia.

Wilayah Kabupaten Nunukan didominasi oleh topografi yang bergelombang dari kemiringan landai sampai curam. Dengan ketinggian perbukitan antara 500 Meter sampai dengan 3.000 Meter dari permukaan laut (DPL). Daerah dataran rendah pada umumnya pada kawasan pantai dan pada kawasan sepanjang sungai. Sedangkan daerah perbukitan terdapat di bagian barat laut dan utara. Secara garis besar dari 1.458.570 Ha keadaan topografi perbukitan memiliki sudut kelerengan lebih dari 30%, untuk daerah yang merupakan dataran tinggi mempunyai kemiringan berkisar antara 8-15%. sedangkan untuk daerah yang merupakan perbukitan kemiringan sangat terjal di atas 15%.

Sehingga dengan demikian kemiringan rata-rata berkisar 0-50%. Sedangkan untuk Pulau Nunukan sendiri di sebelah barat daya pada umumnya memiliki daerah yang sangat curam, sedangkan di bagian pantai timur daerahnya sedikit bergelombang antara 3-8 % dan yang berbukit sekitar 15-25%. Begitu pula dengan daerah Pulau Sebatik, topografinya hampir sama dengan Pulau Nunukan, daerahnya datar dan sedikit bergelombang dengan kemiringan 0-3%.

Kabupaten Nunukan terdiri dari 16 Kecamatan, 8 Kelurahan dan 232 Desa dengan rincian sebagai berikut:

- a. Nunukan terdiri dari 1 Desa dan 4 Kelurahan
- b. Nunukan Selatan terdiri dari 4 Kelurahan
- c. Seimenggaris terdiri dari 4 Desa
- d. Sebatik terdiri dari 4 Desa
- e. Sebatik Barat terdiri dari 4 Desa
- f. Sebatik Utara terdiri dari 3 Desa
- g. Sebatik Timur terdiri dari 4 Desa
- h. Sebatik Tengah terdiri dari 4 Desa
- i. Sebuku terdiri dari 12 Desa
- j. Tulin Onsoi terdiri dari 12 Desa
- k. Sembakung terdiri dari 10 Desa
- l. Sembakung Atulai terdiri dari 10 Desa
- m. Lumbis terdiri dari 28 Desa
- n. Lumis Ogong terdiri dari 49 Desa
- o. Krayan terdiri dari 65 Desa
- p. Krayan Selatan terdiri dari 24 Desa

Jumlah penduduk Kabupaten Nunukan menurut Sensus Penduduk Tahun 2015 sebanyak 140.841 jiwa yang terdiri dari 75.171 jiwa penduduk laki-laki dan 65.670 jiwa penduduk perempuan, dengan kepadatan rata-rata 9,87 jiwa per Km<sup>2</sup>. Rasio penduduk menunjukkan angka 114,47 yang berarti penduduk laki-laki lebih banyak dari pada penduduk perempuan. Dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan Pemerintah Kabupaten Nunukan didukung oleh Instansi Pemerintah dengan jumlah PNS sebanyak 4.421 orang pegawai.

## **2. Gambaran Umum Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan**

Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Nunukan melalui Sekretariat Daerah. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 23 Tahun 2008, pasal 57 tentang Tugas Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan mempunyai tugas dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang kebersihan, pertamanan dan pemakaman serta pemadam kebakaran berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam pasal 58 Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 23 Tahun 2008, untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 57, Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam kebakaran sesuai dengan Rencana Strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang kebersihan, pertamanan dan pemadam kebakaran;
- c. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang kebersihan;
- d. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian kebijakan teknis dibidang Pertamanan dan Pemakaman;
- e. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian kebijakan teknis dibidang pemadam kebakaran;
- f. Pembinaan Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas;
- g. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Hingga akhir tahun 2015, Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dibidang kebersihan. Pencapaiann penanganan sampah dinyatakan kurang berhasil dimana target pada tahun 2015 sebesar 75% berdasarkan volume sampah yang di tangani, sedangkan produksi sampah yang dihasilkan oleh masyarakat dirata-ratakan perorang sebesar  $0,0025 \text{ m}^3 \times 356$  hari.

Dapat dijelaskan dalam table bahwa produksi timbulan sampah berdasarkan jumlah penduduk tahun 2015 pulau Nunukan (Kecamatan Nunukan )

sebesar 134.181,3 m<sup>2</sup> dan pulau Sebatik (Kec.Sebatik, Sebatik Barat, Sebatik Timur, Sebatik Utara dan Sebatik Tengah) sebesar 39.452,85 m<sup>2</sup>. Jadi secara keseluruhan produksi timbulan sampah tahun 2015 berdasarkan jumlah penduduk yaitu sebesar 173.634,15 m<sup>2</sup>.

**Tabel 4.1**  
**Data Timbulan Sampah Berdasarkan Jumlah Penduduk Tahun 2015**  
**Pulau Nunukan**

Kecamatan	Desa/ kelurahan	Jumlah penduduk		Jumlah KK	Asumsi (litr)	Jumlah Sampah (hari)	
		Laki- laki	Perempuan			litr	M <sup>3</sup>
Nunukan	Nunukan Timur	9632	8700	4650	2,5	45830,00	45,83
	Nunukan Barat	9128	7957	4218	2,5	42712	42,71
	Nunukan Utara	4999	4445	2451	2,5	23610,00	23,61
	Binusan	8160	7380	1195	2,5	38850,00	38,85
	Nunukan Tengah	2683	2179	3772	2,5	12155,00	12,16
<b>Jumlah Penduduk</b>		<b>34602</b>	<b>30661</b>	<b>16286</b>		<b>Jumlah Sampah / Hari</b>	<b>163,16</b>
Nunukan Selatan	Selisun	2853	2371	1285	2,25	13060	13,06
	Nunukan Selatan	3104	2776	1489	2,25	14700	14,70
	Mansapa	1126	932	523	2,25	5145	5,15
	Tanjung Harapan	1793	1568	890	2,25	8402,5	8,40
<b>Jumlah Penduduk</b>		<b>8876</b>	<b>38308</b>	<b>20473</b>		<b>Jumlah Sampah / Hari</b>	<b>204,47</b>
<b>Jumlah Penduduk Pulau Nunukan</b>		<b>43478</b>	<b>68969</b>	<b>36759</b>		<b>Jumlah Sampah P. Nunukan</b>	<b>367,62</b>

## Pulau Sebatik

Kecamatan	Desa/ kelurahan	Jumlah Penduduk		Jumlah KK	Asumsi (Itr)	Jumlah Sampah (hari)	
		Laki- laki	Laki- laki			Itr	M <sup>3</sup>
Sebatik	Tanjung Karang	1863	1579	849	2,5	8605,00	8,605
	Balangsiku	766	646	363	2,5	3530,00	3,53
	sei. Manurung	555	503	244	2,5	2645,00	2,645
	Padaidi	390	343	186	2,5	1832,50	18,325
<b>Jumlah Penduduk</b>		<b>3574</b>	<b>3071</b>	<b>1642</b>		<b>Jumlah Sampah / hari</b>	<b>16,6125</b>
Sebatik Barat	Liyangbunyu	1345	1179	623	2,25	5679	5,68
	binalawan	1353	1234	609	2,25	5820,75	5,82
	setabu	1626	1538	746	2,25	7119	7,12
	bambangan	1037	903	263	2,25	4365	4,37
<b>Jumlah</b>		<b>5361</b>	<b>4854</b>	<b>2441</b>		<b>Jumlah Sampah / hari</b>	<b>22,98</b>
Sebatik Timur	Sei nyamuk	3099	2826	1501	2,25	13331,25	13,33
	Tanjung Harapan	1530	1394	746	2,25	6579	6,58
	Bukit Aru Indah	1762	1677	828	2,25	7737,75	7,74
	Tanjung Aru	1449	1286	681	2,25	6153,75	6,15
<b>Jumlah</b>		<b>7840</b>	<b>7183</b>	<b>3756</b>		<b>Jumlah Sampah / hari</b>	<b>33,80</b>
Sebatik Utara	Sei Pancang	2793	2603	1312	2,25	12141	12,14
	Lapri	647	566	284	2,25	2729,25	2,73
	Seberang	719	651	349	2,25	3082,5	3,08
<b>Jumlah</b>		<b>4159</b>	<b>3820</b>	<b>1945</b>		<b>Jumlah Sampah / hari</b>	<b>17,95</b>
Sebatik Tengah	Sei Limau	1316	1189	599	2,25	5636,25	5,64
	Maspul	382	342	173	2,25	1629	1,63
	Aji Kuning	1597	1489	742	2,25	6943,5	6,94
	Bukit Harapan	588	537	257	2,25	2531,25	2,53
<b>Jumlah</b>		<b>3883</b>	<b>3557</b>	<b>1771</b>		<b>Jumlah Sampah / hari</b>	<b>1674</b>
<b>Jumlah Penduduk Pulau Sebatik</b>		<b>24817</b>	<b>22485</b>	<b>11555</b>		<b>Jumlah Sampah P. SEBATIK</b>	<b>108,09</b>

Adapun jumlah produksi timbulan sampah yang dikelola oleh DKPPK Kabupaten Nunukan pada tahun 2015 sebesar 29.816,4 m<sup>3</sup>/per tahun sedangkan produksi sampah yang dihasilkan oleh masyarakat sebesar 110.644,74 m<sup>3</sup> per tahun. Sehingga realisasi yang dicapai oleh DKPPK Kabupaten Nunukan pada tahun 2015 yaitu sebesar 25,27% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 33,69%. Nilai pencapaian tersebut berada pada rentang nilai < 49 sehingga dapat dikategorikan kinerjanya “kurang baik”.

Berikut akan disajikan data sampah yang dikelola oleh DKPPK Kabupaten Nunukan pada tahun 2015, sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Data Sampah Yang Dikelola Tahun 2015**

No	Bulan	Volume Sampah (M <sup>3</sup> )		Total (M <sup>3</sup> )
		TPA Tanjung Harapan	TPA Sebatik	
1	Januari	1870	363,7	2233,7
2	Februari	2349,6	344	2693,6
3	Maret	1665,3	385,1	2050,4
4	April	2265,2	361,6	2626,8
5	Mei	2383,1	384,8	2767,9
6	Juni	2302,9	369,4	2672,3
7	Juli	1732,5	295,5	2028
8	Agustus	2064	384,2	2448,2
9	September	2058,1	357,3	2415,4
10	Oktober	2001,6	368,4	2370
11	Nopember	2382,4	364,5	2746,9
12	Desember	2383,1	380,1	2763,2
	Jumlah	25457,8	4358,6	29816,4

Sumber: LAKIP DKPPK Kabupaten Nunukan (2015)

Pada tahun 2015 volume sampah yang dikelola oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan untuk TPA Tanjung Harapan adalah sebesar 25457,8 m<sup>3</sup> dan TPA Sebatik sebesar 4358,6 m<sup>3</sup>, sehingga

secara keseluruhan yang sampah dikelola oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan Tahun 2015 sebesar 29816,4 m<sup>3</sup>.

Adapun lokasi penempatan TPS di beberapa yaitu : Kecamatan Nunukan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kelurahan Sebatik Induk, Kelurahan Sebatik Barat, Kelurahan Sebatik Timur, Kelurahan Sebatik Utara dan Kelurahan Sebatik Tengah.

Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan masyarakat Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan ditunjang dengan rincian Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 23 Tahun 2008 pasal 59, Susunan Organisasi Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
  - 1). Kasubag Penyusunan Program dan Pelaporan
  - 2). Kasubag Umum
  - 3). Kasubag Keuangan
- c. Kepala Bidang Kebersihan
  - 1). Kasi Penanganan Kebersihan Lingkungan
  - 2). Kasi Penanganan Bantaran Sungai/TPA
- d. Kepala Bidang Pertamanan dan Pemakaman
  - 1). Kasi Pertamanan
  - 2). Kasi Pemakaman
  - 3). Kasi PJU dan Keindahan Kota
- e. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran

- 1). Kasi Pencegahan Kebakaran
  - 2). Kasi Pemadam Kebakaran
- f. Kelompok jabatan fungsional
  - g. Kepala UPTD

Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan mempunyai tugas pokok membantu Bupati menyusun kebijakan teknis dan perencanaan operasional serta melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dibidang kebersihan, pertamanan dan pemadam kebakaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan dibidang kebersihan, pertamanan dan pemadam kebakaran sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan;
- b. Perumusan, perencanaan pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis kesekretariatan dinas;
- c. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang kebersihan;
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pertamanan dan pemakaman;
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang pemadam kebakaran;
- f. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dan kelompok jabatan fungsional;

- g. Evaluasi dan pelaporan tatalaksana rumah tangga dinas; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas menyelenggarakan Tugas sebagai berikut:

- a. Memimpin dan mengendalikan organisasi DKPPK agar lebih berdaya guna dan berhasil guna
- b. Mengkoordinasikan perumusan serta menetapkan kebijakan teknis operasional bidang kebersihan, pertamanan dan pemadam kebakaran sesuai standar, prosedur dan kreteria yang telah ditetapkan
- c. Membina dan mengendalikan penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas
- d. Mengkoordinasikan penyusunan standar pelayanan minimal dibidang kebersihan, pertamanan dan pemadam kebakaran
- e. Membina dan mengendalikan penyelenggaraan perijinan dan pelayanan umum dibidang kebersihan, pertamanan dan pemadam kebakaran
- f. Mengkoordinasikan perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang kebersihan
- g. Mengkoordinasikan perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan tekknis bidang pertamanan dan pemakaman
- h. Mengkoordinasikan perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan tekknis bidang pemadam kebakaran
- i. Melaksanakan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional

- j. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait yang berhubungan dengan bidang kebersihan, pertamanan dan pemadam kebakaran;
- k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja dibidang kebersihan pertamanan dan pemadam kebakaran
- l. Melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang kebersihan pertamanan dan pemadam kebakaran dan menyusun petunjuk pemecahanya
- m. Memberikan sarana dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya
- n. Membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing
- o. Memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja kepada bawahan
- p. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan
- q. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati dan Sekretaris Daerah sesuai lingkup tugasnya.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan. Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan kegiatan bidang-bidang serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan/unit kerja di lingkungan

Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut, Sekretaris menyclenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja dan anggaran di lingkungan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran
- b. Pengelolaan dan pengendalian kegiatan administrasi umum dan kepegawaian serta hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran
- c. Pengelolaan dan pengendalian administrasi keuangan di lingkungan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran
- d. Pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh bidang/unit kerja di lingkungan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran
- e. Evaluasi kinerja kesekretariatan dan pelaporan tatalaksana rumah tangga dinas
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Mempelajari dan mengolah peraturan perundangan-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya

- b. Menyusun rencana kerja dan kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dan acuan kerja
- c. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran di lingkungan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran
- d. Merumuskan bahan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
- e. Merumuskan bahan dan mengendalikan pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan/perbekalan rumah tangga Dinas
- f. Merumuskan bahan pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Dinas
- g. Merumuskan bahan penyajian data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Dinas
- h. Merumuskan bahan pembinaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran
- i. Merumuskan bahan dan mengendalikan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas, pembukuan, verifikasi dan perbendaharaan di lingkungan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran
- j. Memberikan dukungan dan pelayanan teknis dan administratif bagi pelaksanaan tugas bidang/unit kerja di lingkungan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran
- k. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan satuan/unit kerja terkait yang dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

- l. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja di lingkungan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran
- m. Melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya serta menyusun petunjuk pemecahan masalah
- n. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya
- o. Membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing
- p. Memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja kepada bawahan
- q. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan
- r. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

Bidang Kebersihan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas menyusun kebijakan teknis dan perencanaan operasional serta melaksanakan pengelolaan urusan di bidang kebersihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut, Bidang Kebersihan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan bahan kebijakan teknis di bidang kebersihan
- b. perumusan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan di bidang kebersihan
- c. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis di bidang penanganan kebersihan lingkungan

- d. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis di bidang penanganan bantaran sungai dan TPA
- e. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang kebersihan
- f. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Kebersihan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Mempelajari dan mengolah peraturan perundangan-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya
- b. Menyusun rencana kerja dan kegiatan Bidang Kebersihan sebagai pedoman dan acuan kerja
- c. Merumuskan bahan penetapan kebijakan teknis dan perencanaan operasional di bidang kebersihan
- d. Menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang kebersihan lingkungan, bantaran sungai dan TPA
- e. Mengkoordinasikan kebijakan operasional penanganan dan pengelolaan kebersihan lingkungan, bantaran sungai dan TPA
- f. Menyelenggarakan analisis dan pengembangan kinerja bidang kebersihan lingkungan, bantaran sungai dan TPA
- g. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan satuan/unit kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

- h. Melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahannya
- i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya
- j. Membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing
- k. Memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja kepada bawahan
- l. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan
- m. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

Seksi Penanganan Kebersihan Lingkungan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Kebersihan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan operasional serta melaksanakan penyusunan program dan kegiatan penanganan kebersihan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Seksi Penanganan Kebersihan Lingkungan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundangan-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya
- b. Menyusun rencana kerja dan kegiatan Seksi Penanganan Kebersihan Lingkungan sebagai pedoman dan acuan kerja

- c. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis penanganan kebersihan lingkungan sesuai lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku
- d. Melaksanakan penerapan dan pengawasan pedoman, manual dan norma di bidang penanganan kebersihan lingkungan
- e. Melaksanakan kegiatan pengumpulan, pembersihan dan pengangkutan sampah lingkungan pemukiman ke TPA
- f. Menyiapkan bahan analisa petunjuk teknis pelaksanaan operasional penanganan kebersihan lingkungan pemukiman
- g. Melaksanakan pengadaan dan pembangunan sarana dan prasarana kebersihan;
- h. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kebersihan di lingkungan masyarakat serta peningkatan peran serta masyarakat
- i. Melaksanakan pengawasan, pemantauan, pengarahan dan sosialisasi dalam lingkup kebersihan lingkungan pemukiman
- j. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang/unit kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas
- k. Melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahannya
- l. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya
- m. Membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing

- n. Memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja kepada bawahan
- o. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya
- p. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

Seksi Penanganan Bantaran Sungai dan TPA mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Kebersihan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan operasional serta melaksanakan program dan kegiatan penanganan bantaran sungai dan TPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Seksi Penanganan Bantaran Sungai dan TPA mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundangan-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya
- b. Menyusun rencana kerja dan kegiatan Seksi Penanganan Bantaran Sungai dan TPA sebagai pedoman dan acuan kerja
- c. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan teknis penanganan bantaran sungai dan TPA sesuai lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku
- d. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan penanganan bantaran sungai dan TPA
- e. Melaksanakan penerapan dan pengawasan pedoman, manual dan norma di bidang penanganan bantaran sungai dan TPA

- f. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, penataan, pengembangan dan pengendalian terhadap penanganan tinja, bantaran sungai dan TPA
- g. Melaksanakan kegiatan pengumpulan, pembersihan dan pengangkutan sampah bantaran sungai dan tinja ke TPA
- h. Melaksanakan analisa petunjuk teknis pelaksanaan operasional penanganan tinja, kebersihan bantaran sungai dan TPA
- i. Melaksanakan pengawasan, pemantauan, pengarahan dan sosialisasi bidang kebersihan bantaran sungai, TPA dan penanganan tinja
- j. Melaksanakan penerimaan, penyimpanan dan pengamanan peralatan dan perbekalan penanganan bantaran sungai dan TPA
- k. Melaksanakan pemeriksaan kerusakan, perbaikan dan pemeliharaan terhadap semua jenis peralatan/kendaraan dinas operasional dan alat besar operasional
- l. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang/unit kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas
- m. Melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahannya
- n. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya
- o. Membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing

- p. Memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja kepada bawahan
- q. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya
- r. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

### **3. Visi dan Misi Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan**

Dalam mengantisipasi tantangan kedepan menuju kondisi yang diinginkan, Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan perlu secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi baru. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat sesuai dengan visi daerah yang ada dalam RPJMD.

Sehubungan dengan itu maka Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam kebakaran Kabupaten Nunukan harus mempunyai Visi sebagai cara pandang jauh kedepan tentang kemana Dinas Kebersihan, Pertamanan dan pemadam kebakaran Kabupaten Nunukan akan diarahkan dan apa yang akan dicapai agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Nunukan maka visi Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut: “Terwujudnya Kabupaten Nunukan yang Bersih, Indah dan Tanggap Bencana Kebakaran”.

Sebagai tindak lanjut hasil analisa isu-isu strategis dan permasalahan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka perumusan perwujudan visi Dinas

Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan tahun 2011-2016 sebagaimana tabel 4.1 berikut:

**Tabel 4.3**  
**Penjelasan Visi Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan**

Visi	Pokok Visi	Penjelasan Visi
Terwujudnya Kabupaten Nunukan yang bersih, indah dan tanggap bencana kebakaran	Bersih	Mengandung nilai masyarakat Nunukan yang cinta kebersihan dalam lingkungan keluarga dan lingkungan sekitarnya
	Indah	Mengandung nilai estetika yang sangat diperlukan masyarakat
	Tanggap Bencana kebakaran	Mengandung nilai antisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran

Sumber: Renstra DKPPK Kabupaten Nunukan (2016)

Guna mewujudkan Visi tersebut di atas, maka disusunlah misi yang menjadi tanggung jawab Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan. Misi adalah suatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi (instansi Pemerintah) agar tujuan organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik, maka dipandang perlu untuk menggariskan beberapa misi yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparat Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran.
- b. Meningkatkan motivasi dan kesadaran masyarakat Kabupaten Nunukan dalam budaya bersih.
- c. Meningkatkan pelayanan dibidang pertamanan dan keindahan kota.
- d. Meningkatkan kesadaran masyarakat yang tanggap bencana kebakaran

#### 4. Tujuan dan Sasaran Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan yang dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Adapun tujuan jangka menengah Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.4**  
**Misi dan Tujuan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan**

No	Misi	Tujuan
1	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia jajaran Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran	Terwujudnya kualitas Sumber Daya Manusia aparatur Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran
2	Meningkatnya motivasi dan kesadaran masyarakat Kabupaten Nunukan dalam Budaya Bersih	Terciptanya kesadaran masyarakat akan menjaga kebersihan dan keindahan kota
3	Meningkatnya pelayanan di bidang pertamanan dan keindahan kota	Meningkatnya keindahan dan kebersihan kota
4	Meningkatnya kesadaran masyarakat yang tanggap bencana kebakaran	Terwujudnya kesadaran masyarakat terhadap penanggulangan akan bahaya kebakaran

Sumber: Renstra DKPPK Kabupaten Nunukan (2016)

Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, maka sasaran dari Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya jumlah SDM aparatur/Staf DKPPK yang mengikuti pendidikan formal dan non formal 15% pertahun.
- b. Meningkatnya jumlah Tenaga Harian Lepas (THL) yang mengikuti pengarah/penyuluhan 20% pertahun.
- c. Berkurangnya tingkat pelanggaran dibidang kebersihan, pertamanan dan pemadam kebakaran.
- d. Berkurangnya pengaduan masyarakat tetang kebersihan, pertamanan dan pemadam kebakaran.
- e. Adanya peningkatan kebersihan lingkungan.
- f. Adanya peningkatan penataan pertamanan dan pemadam kebakaran sesuai *landscape* dan *layout* tata kota.

## **5. Strategi dan Kebijakan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan**

Strategi merupakan rencana menyeluruh tentang segala upaya meliputi penetapan kebijakan, program operasional, dan kegiatan dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Strategi memberikan pandangan dalam melaksanakan tujuan dan sasaran. Didalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan visi dan misi secara rasional, efisien dalam pendanaan dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan.

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah.

**Tabel 4.5**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan**

<b>Visi: Terwujudnya Kabupaten Nunukan Yang Bersih, Indah dan Tanggap Bencana Kebakaran</b>			
<b>Misi I: Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur DKPPK</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
Meningkatkannya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan bersih	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan keuangan daerah yang baik	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan bersih	Laporan keuangan DKPPK Kabupaten Nunukan harus disusun tepat waktu serta secara terus menerus guna meningkatkan kualitas pelaporan
	Meningkatnya profesionalisme Aparatur		Memberikan kesempatan yang sama kepada pegawai untuk mengikuti pendidikan formal dan non formal
	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai		Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia pengelola persampahan, draenase, pertamanan, PJU dan PMK melalui uji kompetensi pendidikan
Meningkatnya	Meningkatnya		Menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran dalam pencapaian tujuan organisasi
			Menyediakan sarana &

pengelolaan administrasi umum kantor	prasarana penunjang kegiatan kantor Melaksanakan penyelenggaraan keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan Mengembangkan sistem data/informasi mengenai pelayanan yang modern
--------------------------------------	---

<b>Visi: Terwujudnya Kabupaten Nunukan yang Bersih, Indah dan Tanggap Bencana Kebakaran</b>			
<b>Misi II: Meningkatnya Pelayanan Dibidang Pertamanan dan Keindahan Kota</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana publik	Meningkatnya fasilitas social	Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana publik yang memadai yang mendorong percepatan akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah	Tertatanya dan terjaganya taman pemakaman umum (TPU) dengan baik akan keindahan dan kebersihannya Mengefektifkan sumber daya yang tersedia dalam peningkatan koordinasi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Peningkatan kapasitas dalam pemanfaatan sumber daya alam Meningkatnya upaya pengendalian dampak lingkungan
<b>Visi: Terwujudnya Kabupaten Nunukan yang Bersih, Indah dan Tanggap Bencana Kebakaran</b>			
<b>Misi III: Meningkatnya Motivasi dan kesadaran masyarakat Nunukan dalam Budaya Bersih dan Indah</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
Meningkatnya Kualitas dan kelestarian Sumber	Meningkatnya lingkungan yang bersih dan asri	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah secara memadai

Daya Alam	Sasaran umum pembangunan drainase adalah terbebasnya saluran saluran drainase dari sampah sehingga mampu meningkatkan fungsi saluran drainase sebagai pemutus air hujan dan berkurangnya wilayah genangan air	dan kelestarian SDA serta meningkatnya lingkungan yang bersih dan asri	<p>Peningkatan peran serta <i>stakeholder</i> dalam upaya mencapai sasaran pengelolaan persampahan pada akhir tahun 2016</p> <p>Menciptakan peraturan yang terkait dengan kementerian, pemerintah, swasta (<i>public-private patnership</i>) dalam pengelolaan persampahan</p> <p>Mendorong terbentuknya regionalisasi pengelolaan persmpahan</p> <p>Peningkatan pengelolaan kinerja persampahan dan drainase melalui restrukturisasi kelembagaan dan revisi peraturan</p> <p>Meningkatnya koordinasi antara pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan ADIPURA</p> <p>Meningkatnya upaya pengendalian dampak lingkungan</p>
<b>Visi: Terwujudnya Kabupaten Nunukan Yang Bersih, Indah dan Tanggap Bencana Kebakaran</b>			
<b>Misi IV: Meningkatnya Kesadaran masyarakat yang tanggap bencana kebakaran</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
Meningkatnya Kinerja dalam kesiagaan dan pencegahan bahaya kebkaran	Meningkatnya fasilitas social	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana publik dan fasilitas umum lainnya	<p>Peningkatan kesiagaan baik aparatur maupun prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran</p> <p>Menumbuhkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan penangulangan kebakaran</p>

Sumber: Renstra DKPPK Kabupaten Nunukan (2016)

## 6. Keadaan Sumber Daya Manusia Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan

Sumber Daya Manusia Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan per Mei 2016 adalah sebanyak 848 orang, yang terdiri dari 86 orang PNS dan 104 orang Non PNS Staf dan Pengawas, 658 orang Non PNS Lapangan DKPPK dan PMK. Secara lengkap komposisi sumber daya manusia DKPPK Kabupaten Nunukan yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4.6**  
**Komposisi Sumber Daya Manusia Menurut Jabatan**

No	Uraian Jabatan	Jumlah
1	Jabatan Struktural	15
2	Jabatan Fungsional	-
3	Staf Administrasi/Lapangan PMK PNS	71
4	Non PNS Staf Adminstrasi/Pengawas	104
5	Non PNS Lapangan DKPPK dan PMK	658
<b>TOTAL</b>		<b>848</b>

Sumber: Renstra DKPPK Kabupaten Nunukan (2016)

Berdasarkan tabel 4.4 di atas diketahui bahwa sumber daya manusia Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan lebih banyak didominasi oleh pegawai yang berstatus Non PNS yang lebih banyak ditugaskan di lapangan daripada menjadi staf di kantor.

**Tabel 4.7**  
**Komposisi Sumber Daya Manusia Menurut Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Pasca Sarjana (S2)	1
2	Sarjana (S1)	32
3	Diploma III (D3)	8
4	Diploma II (D2)	1
5	SMA	368
6	SMP	86
7	SD	281
8	Tidak Sekolah	71
<b>TOTAL</b>		<b>848</b>

Sumber: Renstra DKPPK Kabupaten Nunukan (2016)

Berdasarkan tabel 4.5 di atas diketahui bahwa sumber daya manusia Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan lebih banyak didominasi oleh pegawai yang memiliki tingkat pendidikan SMA sedangkan pegawai yang berpendidikan S2. Dan Diploma 2 paling sedikit.

**Tabel 4.8**  
**Komposisi Sumber Daya Manusia Menurut Golongan**

No	Golongan	Jumlah
1	Pembina Tk I (IV/b)	1
2	Penata Tk I (III/d)	3
3	Penata (III/c)	8
4	Penata Muda Tk I(III/b)	2
5	Penata Muda (III/a)	1
6	Pengatur (II/c)	3
7	Pengatur Muda Tk I (II/b)	49
8	Pengatur Muda (II/a)	10
9	Juru (I/c)	1
10	Juru Tk I (I/d)	4
11	Juru Muda Tk I (I/b)	3
12	Juru Muda (I/a)	1
<b>TOTAL</b>		<b>86</b>

Sumber: Renstra DKPPK Kabupaten Nunukan (2016)

Berdasarkan tabel 4.6 di atas diketahui bahwa sumber daya manusia Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan lebih banyak didominasi oleh pegawai yang memiliki golongan Pengatur Muda Tingkat I (II/b), sedangkan golongan yang lain tidak terlalu banyak jumlahnya.

## **B. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Kondisi pengelolaan persampahan di berbagai kota di Indonesia terlihat masih belum berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari tingkat pelayanan yang persampahan yang masih mengalami peningkatan dan penurunan. Tingkat

pelayanan persampahan pada tahun 2013 hanya mencapai 40% menurun jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang pernah mencapai 50%.

Namun, tingkat pelayanan ini terlihat mengalami peningkatan kembali hingga mencapai 56% setelah tahun 2014 tersebut. Kondisi ini tentu membutuhkan perhatian yang serius agar dapat menghindari terjadinya penurunan kinerja tingkat pelayanan persampahan. Diharapkan, tingkat pelayanan dapat terus meningkat di kemudian hari. Bila dilihat dari sistem pengelolaan persampahan yang diterapkan, pada umumnya berbagai kota di Indonesia masih menggunakan paradigma lama kumpul-angkut-buang.

Pada kenyataannya, penerapan paradigma lama ini memberikan dampak negatif karena sampah tidak dikelola dan tidak ada upaya pengurangan timbulan sampah. Akibatnya, tempat pembuangan akhir (*landfill*) menjadi cepat penuh. Padahal kondisi saat ini, mencari lokasi baru untuk tempat pembuangan akhir (*landfill*) sangat sulit dan umumnya selalu ditolak oleh masyarakat. Permasalahan lainnya yang muncul adalah terkait dengan pencemaran air leachate dan potensi timbulan gas di *landfill* yang terus mengalami peningkatan karena jumlah sampah juga terus mengalami peningkatan.

Konsep pengelolaan sampah dengan menggunakan paradigma lama ini sudah saatnya diganti dengan paradigma baru yang menerapkan pengelolaan sampah terpadu. Pengelolaan sampah terpadu ini tidak hanya mengolah sampah tetapi sudah termasuk didalamnya pengurangan sampah sehingga dapat membantu mengurangi beban TPA. Selain itu, adanya pengurangan sampah juga dapat membantu mengurangi tidak hanya peralatan yang digunakan seperti peralatan pengumpulan dan pengangkutan tetapi juga biaya operasional.

## 1. Efektivitas

Persampahan telah menjadi salah satu agenda permasalahan utama yang dihadapi oleh hampir seluruh perkotaan di Indonesia. Pesatnya pertumbuhan jumlah penduduk, laju pembangunan dan perkembangan kota yang tinggi, teknologi yang semakin canggih, serta aktivitas manusia yang semakin meningkat, tentu akan sebanding dengan peningkatan jumlah dan jenis sampah yang dihasilkan. Sehingga, hal tersebut pasti akan memberikan kontribusi yang besar pula terhadap resiko tercemar dan menurunnya kualitas lingkungan.

Masalah sampah kini bukan hanya menjadi masalah pribadi saja, melainkan sudah menjadi masalah publik. Masalah publik adalah masalah bersama dan oleh karena itu diperlukan intervensi dari pemerintah yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan dalam mengatur kepentingan umum. Pelayanan pengelolaan sampah di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran yang dibebankan pada Bidang Kebersihan.

Penumpukan sampah yang terjadi di Kabupaten Nunukan disebabkan karena volume sampah yang diangkut tidak seimbang dengan volume sampah yang dikelola, kebiasaan masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Efektivitas pengelolaan sampah di Kabupaten Nunukan dilihat dari pengelolaan sampah dari tempat asalnya sampai ke tempat pembuangan sementara sebelum menuju tahapan berikutnya. Pengangkutan dilakukan dengan menggunakan sarana bantuan berupa alat transportasi tertentu menuju ke tempat pembuangan akhir/pengolahan. Tahap pembuangan akhir/pengolahan dimana

sampah akan mengalami pemrosesan baik secara fisik, kimia maupun biologis sedemikian hingga tuntas penyelesaian seluruh proses.

Selama ini, pengelolaan sampah di Kabupaten Nunukan masih kurang efektif, terutama dalam penanganan sampah di lapangan, seperti dalam pelaksanaan teknis operasional. Aspek yang paling menentukan dalam kinerja pengelolaan sampah pada dasarnya dilihat sebagai komponen-komponen sub sistem yang saling mendukung satu dengan yang lain, serta saling berinteraksi untuk mencapai tujuan, yaitu lingkungan yang bersih, indah, sehat, dan teratur.

Hingga akhir tahun 2015, Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya di bidang kebersihan. Pencapaian penanganan sampah dinyatakan kurang berhasil dimana target pada tahun 2015 sebesar 75% berdasarkan volume sampah yang di tangani oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran, sedangkan produksi sampah yang dihasilkan oleh masyarakat dirata-ratakan perorang sebesar  $0,0025 \text{ m}^3 \times 356$  hari.

Adapun jumlah produksi timbulan sampah yang dikelola DKPPK Kabupaten Nunukan pada tahun 2015 sebesar  $29.816,4 \text{ m}^3$  per tahun sedangkan produksi sampah yang dihasilkan oleh masyarakat sebesar  $110.644,74 \text{ m}^3$  per tahun. Sehingga realisasi yang dicapai Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran pada tahun 2014 masih rendah yaitu sebesar 25,27% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 33,69%. Nilai pencapaian tersebut berada pada rentang nilai  $< 49$  sehingga dapat dikategorikan “kurang baik”.

Dalam pembahasan ini bahwasannya sampah bukanlah semata hanya tugas dinas terkait yaitu DKPPK saja, namun kami juga perlu dukungan Pemerintah

Daerah dan juga Instansi terkait lainnya seperti BLHD (Badan Lingkungan Hidup) dan DPU (Dinas Pekerjaan Umum) serta Masyarakat itu sendiri. Dalam wawancara kami dengan Kadis DKPPK bahwa, ” kurang efektifnya dalam penanganan sampah ini karena berpengaruh terhadap manajemen persampahan tersebut, dimana fungsi manajemen adalah perencanaan, pengorganisasian, pengaktualisasi dan pengawasan. Dalam perencanaan kedepan DKPPK akan lebih memfokuskan masalah manajemen persampahan ini akan mempunyai nilai jual yang tinggi dengan target masyarakat sebagai penyedia bank-bank sampah terutama limbah rumah tangga yang mereka kelola sendiri, sehingga petugas pekerja pengangkutan akan lebih efektif dari segi waktu dan biaya operasionalnya, mengapa saya mengatakan demikian karena waktu yang di butuhkan dalam pemungutan sampah tersebut lebih sedikit sebab sampah yang mereka buang hanya sampah yang sulit mereka kelola atau di lakukan dengan cara 3R, dan menghemat BBM oprasional. Selain itu akan mengurangi timbunan sampah di TPA karena masih system *open dumping*.

Berdasarkan produksi sampah yang dikelola berdasarkan laporan pengawas tahun 2015 sebagai berikut :

Tabel : 4.9  
 PRODUKSI TIMBULAN SAMPAH YANG DIKELOLA BERDASARKAN  
 LAPORAN PENGAWASAN TPA 2015

No	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	JUMLAH TIMBULAN SAMPAH/HARI		JUMLAH TIMBULAN SAMPAH/BULAN		JUMLAH TIMBULAN SAMPAH / TAHUN		PRESENTASE
			m <sup>3</sup>	TON	m <sup>3</sup>	TON	m <sup>3</sup>	TON	
1	Nunukan	Nunukan Timur	44,04	8,81	1.305,62	261,32	15.679,46	3.135,89	27,61%
		Nunukan Barat	41,04	8,21	1.217,74	243,55	14.612,90	2.922,58	25,73%
		Nunukan Utara	22,69	4,54	673,13	134,63	8.077,51	1.615,50	14,23%
		Binusan	0,67	0,13	19,81	3,96	237,69	47,54	0,42%
		Nunukan Tengah	11,68	2,34	346,54	69,31	4.158,50	831,70	7,32%
2	Nunukan Selatan	Selusun	12,55	2,51	372,34	74,47	4.468,12	893,62	7,87%
		Nunukan Selatan	14,13	2,83	419,10	83,82	5.029,20	1.005,84	8,86%
		Mansaba	0,29	0,06	8,43	1,69	101,14	20,23	0,18%
		Tanjung Harapan	-	-	-	-	-	-	-
3	Sebatik	Tanjung Karang	2,78	0,55	82,62	16,52	991,43	198,29	1,75%
		Balensiku	-	-	-	-	-	-	-
		Sungai Manurung	0,29	0,06	8,43	1,69	101,14	20,23	0,18%
		Padaidi	-	-	-	-	-	-	-
4	Sebatik Barat	Liang Bunyu	-	-	-	-	-	-	-
		Binalawan	-	-	-	-	-	-	-
		Setabu	-	-	-	-	-	-	-
		Bambangan	-	-	-	-	-	-	-
5	Sebatik Timur	Sei Nyamuk	4,79	0,96	142,2	28,44	1.706,63	341,33	3,01%
		Tanjung Harapan	-	-	-	-	-	-	-
		Bukit Aru Indah	-	-	-	-	-	-	-
		Tanjung Aru	-	-	-	-	-	-	-
6	Sebatik Utara	Sei Pancang	4,37	0,87	129,52	25,90	1.554,26	310,85	2,74
		Lapri	-	-	-	-	-	-	-
		Seberang	-	-	-	-	-	-	-
7	Sebatik Tengah	Sei Limau	-	-	-	-	-	-	-
		Maspul	-	-	-	-	-	-	-
		Aji kuning	0,19	0,04	5,48	1,10	69,74	13,15	0,12
		Bukit Harapan	0	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>			<b>159,51</b>	<b>31,90</b>	<b>4.731,98</b>	<b>946,40</b>	<b>56.783,71</b>	<b>11.356,74</b>	

Jumlah sampah TPA Tanjung Harapan = 52.364,5m<sup>3</sup>  
 Jumlah sampah TPA Sebatik = 4.419,2m<sup>3</sup>

## 2. *Planning*

*Planning* (perencanaan) ialah penetapan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan. *Planning* atau perencanaan mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk dalam pemilihan alternatif-alternatif keputusan. Diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualisasi dan melihat ke depan guna merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan untuk masa mendatang.

Proses perencanaan pengelolaan persampahan pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara berisi langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menentukan tujuan perencanaan;
- b. Menentukan tindakan untuk mencapai tujuan;
- c. Mengembangkan dasar pemikiran kondisi mendatang;
- d. Mengidentifikasi cara untuk mencapai tujuan; dan
- e. Mengimplementasi rencana tindakan dan mengevaluasi hasilnya.

Perencanaan terdiri atas dua elemen penting, yaitu sasaran (*goals*) dan rencana (*plan*). Sasaran yaitu hal yang ingin dicapai oleh individu, kelompok, atau seluruh organisasi. Sasaran sering pula disebut tujuan. Sasaran memandu manajemen membuat keputusan dan membuat kriteria untuk mengukur suatu pekerjaan. Rencana adalah dokumen yang digunakan sebagai skema untuk mencapai tujuan. Rencana biasanya mencakup alokasi sumber daya, jadwal, dan tindakan-tindakan penting lainnya. Rencana dibagi berdasarkan cakupan, jangka waktu, kekhususan, dan frekuensi penggunaannya.

Suatu perencanaan yang baik harus menjawab enam pertanyaan yang tercakup dalam unsur-unsur perencanaan yaitu:

- a. Tindakan apa yang harus dikerjakan, yaitu mengidentifikasi segala sesuatu yang akan dilakukan
- b. Apa sebabnya tindakan tersebut harus dilakukan, yaitu merumuskan faktor-faktor penyebab dalam melakukan tindakan
- c. Tindakan tersebut dilakukan, yaitu menentukan tempat atau lokasi
- d. Kapan tindakan tersebut dilakukan, yaitu menentukan waktu pelaksanaan tindakan
- e. Siapa yang akan melakukan tindakan tersebut, yaitu menentukan pelaku yang akan melakukan tindakan, dan
- f. Bagaimana cara melaksanakan tindakan tersebut, yaitu menentukan metode pelaksanaan tindakan.

Rencana-rencana pengelolaan persampahan pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara dapat diklasifikasikan menjadi:

- a. Rencana pengembangan. Rencana-rencana tersebut menunjukkan arah (secara grafis) tujuan dari lembaga atau perusahaan
- b. Rencana laba. Jenis rencana ini biasanya difokuskan kepada laba per produk atau sekelompok produk yang diarahkan oleh manajer. Maka seluruh rencana berusaha menekan pengeluaran supaya dapat mencapai laba secara maksimal

- c. Rencana pemakai. Rencana tersebut dapat menjawab pertanyaan sekitar cara memasarkan suatu produk tertentu atau memasuki pasaran dengan cara yang lebih baik, dan
- d. Rencana anggota-anggota manajemen. Rencana yang dirumuskan untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan anggota-anggota manajemen menjadi lebih unggul.

Tipe-tipe perencanaan pengelolaan persampahan pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara terinci sebagai berikut:

- a. Perencanaan jangka panjang (*Short Range Plans*), jangka waktu 5 tahun atau lebih
- b. Perencanaan jangka pendek (*Long Range Plans*), jangka waktu 1 s/d 2 tahun
- c. Perencanaan strategi, yaitu kebutuhan jangka panjang dan menentukan komprehensif yang telah diarahkan
- d. Perencanaan operasional, kebutuhan apa saja yang harus dilakukan untuk mengimplementasikan perencanaan strategi untuk mencapai tujuan strategi tersebut
- e. Perencanaan tetap, digunakan untuk kegiatan yang terjadi berulang kali (terus-menerus), dan
- f. Perencanaan sekali pakai, digunakan hanya sekali untuk situasi yang unik.

Dasar-dasar perencanaan pengelolaan persampahan pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara meliputi:

- a. *Forecasting*, proses pembuatan asumsi-asumsi tentang apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang
- b. *Penggunaan skenario*, meliputi penentuan beberapa alternatif skenario masa yang akan datang atau peristiwa yang mungkin terjadi
- c. *Benchmarking*, perbandingan eksternal untuk mengevaluasi secara lebih baik suatu arus kinerja dan menentukan kemungkinan tindakan yang dilakukan untuk masa yang akan datang
- d. *Partisipan dan keterlibatan*, perencanaan semua orang yang mungkin akan mempengaruhi hasil dari perencanaan dan atau akan membantu mengimplementasikan perencanaanperencanaan tersebut, dan
- e. *Penggunaan staf perencana*, bertanggung jawab dalam mengarahkan dan mengkoordinasi sistem perencanaan untuk organisasi secara keseluruhan atau untuk salah satu komponen perencanaan yang utama.

Tujuan perencanaan pengelolaan persampahan pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memberikan pengarahan baik untuk manajer maupun karyawan non-manajerial
- b. Untuk mengurangi ketidakpastian
- c. Untuk meminimalisasi pemborosan, dan

d. Untuk menetapkan tujuan dan standar yang digunakan dalam fungsi selanjutnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan terkait dengan perencanaan pengelolaan persampahan pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan mengatakan bahwa:

“Saat ini kita masih dengan sistem pengangkutan sampah, yaitu sistem *open dumping*. Terus perencanaan yang dilakukan saat ini kita masih berupaya untuk memperbaiki sarana dan prasarana yang ada, mulai dari armadanya, sistem operasional kerjanya, personil (pekerja lapangan pengangkutan). Untuk menambah personil pekerja pengangkutan mungkin masih cukup, namun apabila ada penambahan luas area pengangkutan maka personil yang saat ini perlu ditambah dan kemudian kita tambah ada pembentukan satgas (satuan tugas) atau patroli sampah dimana patroli sampah itu dibantu dengan sarana, mobil patroli, yang dilengkapi sirine dan toa, jadi ketika ada yang membuang sampah di jalan satgas ini akan memberi peringatan dengan pengeras suara namun semua itu membutuhkan anggaran yang banyak.”

Selanjutnya menurut Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan terkait dengan upaya yang harus dilakukan untuk menanggulangi masalah sampah di Kabupaten Nunukan mengatakan bahwa:

“Menurut saya kita harus berupaya mendaur ulang sampah dengan melibatkan semua sektor baik itu pemerintah, masyarakat dan dunia usaha sehingga sampah bukan lagi menjadi ancaman melainkan peluang bagi kita untuk meningkatkan PAD”.

Sementara Sekretaris Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan terkait dengan perencanaan pengelolaan persampahan pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan mengatakan bahwa:

“Kita sedang memperbaiki kendaraan kita yang tidak layak pakai lagi, dan kita ada penambahan satgas untuk memaksimalkan pengelolaan sampah ini. Lalu dalam efektifitas manajemen pengelolaan sampah Dinas

Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan memang pengelola inti dalam peneglolaan sampah ini, tapi kita juga melibatkan dinas lain juga untuk membantu kita seperti Dinas Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum , dalam bentuk bantuan sarana dan prasarana, kalau yang kita lakukan saat ini ya baru seperti itu”.

Lebih lanjut Sekretaris Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan, terkait dengan upaya yang harus di lakukan untuk menanggulangi masalah sampah, mengatakan bahwa:

“Kita harus menambah jumlah personil, armada. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan lain-lain. Bila perlu sampah-sanpah tersebut kita manfaatkan supaya bisa mendatangkan uang”.

Adapun Kepala Bidang Kebersihan terkait dengan perencanaan pengelolaan persampahan pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan mengatakan bahwa:

“Perencanaan yang kami dilakukan saat ini dengan memperbaiki sarana dan prasaranan kendaraan. Tadinya mobil kita tua semua, dibawah tahun 2000, sekarang sudah lebih dari 15 mobil yang sudah ada. Kemudian untuk menambah intensitas dilapangan kita meningkatkan pelayanan pengangkutan seperti Dum truck, amrol dan motor gandeng untuk lorong – lorong dan penambahan pekerja penyapu jalan untuk di jalan protocol kota untuk *mbackup* sampah-sampah yang bertaburan dan yang di buang sembaragan oleh masyarakat lewat kendaraan. Yang harus kita lakukan selain pengangkutan sampah saya kira kesadaran masyarakat juga perlu ditingkatkan agar tidak membuang sampah sembarangan dan juga sampah ini kan bisa bernilai ekonomis jika masyarakat kita kreatif. Selain itu juga sampah ini kan merupakan salah satu sumber PAD Kabupaten Nunukan”.

Sedangkan Kepala Seksi Penanganan Kebersihan Lingkungan terkait dengan perencanaan pengelolaan persampahan pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan mengatakan bahwa:

“Perencanaan yang dilakukan yang ada untuk saat sekarang ini mulai menambah armada pengangkut sampah dari unit terkecil seperti gerobak sampah yang masih minim. Ya selain itu kesadaran masyarakat untuk tertib dalam membuang sampah perlu kita tingkatkan, tentu sampah ini bukan hanya tanggungjawab DKPPK Kabupaten Nunukan saja”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa perencanaan yang dilakukan yaitu memperbaiki sarana dan prasarana dan memberntuk satuan tugas berupa mobil patroli sampah sebagai peringatan bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Selain itu juga Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan terus berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tertib dalam membuang sampah.

### 3. *Organizing*

*Organizing* berasal dari kata *organon* dalam bahasa Yunani yang berarti alat, yaitu proses pengelompokan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan dan penugasan setiap kelompok kepada seorang manajer. Pengorganisasian dilakukan untuk menghimpun dan mengatur semua sumber-sumber yang diperlukan, termasuk manusia, sehingga pekerjaan yang dikehendaki dapat dilaksanakan dengan berhasil. Tujuan organisasi merupakan pernyataan tentang keadaan atau situasi yang tidak terdapat sekarang, tetapi dimaksudkan untuk dicapai pada waktu yang akan datang melalui kegiatan-kegiatan organisasi.

Pengorganisasian pengelolaan persampahan pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara bermanfaat sebagai berikut:

- a. Dapat lebih mempertegas hubungan antara anggota satu dengan yang lain
- b. Setiap anggota dapat mengetahui kepada siapa ia harus bertanggung jawab

- c. Setiap anggota organisasi dapat mengetahui apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan posisinya dalam struktur organisasi
- d. Dapat dilaksanakan pendelegasian wewenang dalam organisasi secara tegas, sehingga setiap anggota mempunyai kesempatan yang sama untuk berkembang, dan
- e. Akan tercipta pola hubungan yang baik antar anggota organisasi, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan dengan mudah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan terkait dengan pembagian kerja yang dilakukan oleh aparat Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Nunukan mengatakan bahwa:

“Pembagian kerja sudah berjalan sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing, seperti pembagian jadwal pengangkutan ada shif mereka sesuai arahan Kabid kebersihan, lalu berjenjang ke kasi Pemukiman dan Lingkungan Hidup, ada korlap, dan Pengawas Lapangan. Lalu kita juga bekerja sama dengan LSM yang membantu sampah di daerah pesisir pantai”.

Terkait dengan kerjasama dengan instansi lain dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Nunukan, Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan mengatakan bahwa:

“Ya tentu seperti yang saya bilang tadi bahwa kita bekerjasama dengan beberapa dinas terkait seperti BLHD dan Dinas PU, LSM dan juga masyarakat”.

Selanjutnya terkait dengan dukungan jumlah personil yang ada pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan dalam

mengelola sampah di Kabupaten Nunukan, Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan mengatakan bahwa:

“Untuk personil Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan sendiri selaku pengelola inti belum begitu efektif, kita sebisa mungkin mencukupi jumlah personil yang ada walaupun sebenarnya kita masih kekurangan dalam jumlah personil apalagi dalam hal pengelolaan sampah, tapi kita sudah cukup terbantu dengan adanya tenaga kontrak, jadi kita maksimalkan personil yang ada dalam bekerja”.

Sementara Sekretaris Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan terkait dengan pembagian kerja yang dilakukan oleh aparat Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan dalam pengelolaan persampahan, mengatakan bahwa:

“Terkait pengorganisasian ada pembagian tugas sesuai dengan tupoksi dari masing – masing Kepala Seksi Penanganan Kebersihan dan Lingkungan Hidup dan Kasi Penanganan Bantaran Sungai dan TPA yang akan memberikan pengarahan kepada coordinator lapangan lalu berjenjang pada pengawasan lapangan. Jika terjadi *trouble* dalam hal pengangkutan kita bisa bekerjasama dengan Badan Lingkungan Hidup Daerah dan Dinas Pekerjaan Umum dan Masyarakat”.

Terkait dengan kerjasama dengan instansi lain dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Nunukan, Sekretaris Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan mengatakan bahwa:

“Ya tentu saja dengan instansi yang tadi saya sebutkan”.

Selanjutnya terkait dengan dukungan jumlah personil yang ada pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan dalam mengelola sampah di Kabupaten Nunukan, Sekretaris Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan mengatakan bahwa:

“Menurut saya dengan dukungan personil yang ada di DKPPK Kabupaten Nunukan saat ini memang belum efektif, kita masih membutuhkan penambahan personil terutama petugas di lapangan, selain itu juga sarana dan prasarana penunjang harus di tambah”.

Adapun Kepala Bidang Kebersihan terkait dengan pembagian kerja yang dilakukan oleh aparat Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan dalam pengelolaan persampahan mengatakan bahwa:

“Pembagian kerja menurut saya sudah berjalan sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing”.

Terkait dengan kerjasama dengan instansi lain dalam hal pengelolaan persampahan, Kepala Bidang Kebersihan mengatakan bahwa:

“Ya kita tentu tidak bisa berdiri sendiri, saat ini kita bekerjasama dengan Badan Lingkungan Hidup Daerah yaitu mungkin dengan adanya bantuan bank sampah, dengan demikian sampah yang akan di buang ke TPA akan berkurang, jika terjadi masalah dalam hal pengangkutan kita berkoordinasi dengan instansi lain seperti Dinas Pekerjaan Umum, misal alat berat, karena terjadi penumpukan sampah di daerah pasar sentral karena kelangkaan BBM sehingga semua insntansi terkait ikut membantu demi menjaga kebersihan di Kabupaten Nunukan”.

Selanjutnya terkait dengan dukungan jumlah personil yang ada pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan dalam mengelola sampah di Kabupaten Nunukan, Kepala Bidang Kebersihan mengatakan bahwa:

“Kalau personil DKPPK Kabupaten Nunukan memaksimalkan saja, ya dibilang efektif benar juga belum, Tingkat kebersihan Kabupaten Nunukan berubah secara signifikan, jadi kita mengoptimalkan yang ada walaupun yang namanya kurang selalu kurang tapi kita harus mensyukuri bahwa kita sudah cukup diperhatikan oleh pak Bupati baik sarana dan prasarana maupun personil kita selalu di dukung”.

Sedangkan Kepala Seksi Penanganan Kebersihan Lingkungan terkait dengan pembagian kerja yang dilakukan oleh aparat Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Nunukan mengatakan bahwa:

“Pembagian kerjanya saya kira sudah berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing”.

Terkait dengan kerjasama dengan instansi lain dalam hal pengelolaan persampahan di Kabupaten Nunukan, Kepala Seksi Penanganan Kebersihan Lingkungan mengatakan bahwa:

“Ya kita bekerjasama dengan BLHD , jika terjadi masalah dalam hal pengangkutan kita turut membantu, kemudian dengan dalam rangka pembersihan di terminal dan dengan Dinas PU membersihkan di gorong-gorong jalan protokol. Kita Selalu berkoordinasi dengan instansi lain dan saling mendukung dalam menjaga kebersihan di Kabupaten Nunukan”.

Selanjutnya terkait dengan dukungan jumlah personil yang ada pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan dalam mengelola sampah di Kabupaten Nunukan, Kepala Seksi Penanganan Kebersihan Lingkungan mengatakan bahwa:

“Kalau personil kita berusaha memaksimalkan yang ada saja, ya memang saat ini masih belum efektif, apalagi dengan jumlah penduduk Kabupaten Nunukan yang bertambah setiap tahunnya membuat volume sampah menjadi bertambah”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa pembagian kerja yang dilakukan oleh aparat Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Nunukan dan sesuai Peraturan Daerah No.23 tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja dinas - dinas Kab. Nunukan dan tindak lanjutnya diturunkan lagi berupa Peraturan Bupati No. 30 Tahun 2010 tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi uraian tugas Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan, sudah berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Dalam hal pengelolaan persampahan DKPPK Kabupaten Nunukan melakukan kerja sama dengan instansi terkait seperti Badan

Lingkungan Hidup Daerah . Dinas PU dan dunia usaha (CSR). Selain itu untuk kebersihan di bandaran sungai dan pesisir pantai juga bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Seharunya di setiap TPA harus memiliki UPTD karena nanti disana akan memiliki susunan organisasi tersendiri dari pengangkutan sampai proses hasil yang mempunyai nilai jual yang tinggi, namun saat ini hanya bersifat sementara karena masih dikelola oleh DKPPK sendiri dan hasil 3R masih berupa kompos padat dan cair, itupun kami gunakan sendiri untuk pemeliharaan taman kota dan bahu bahu jalan agar terlihat asri dan indah.

Jumlah personil yang ada saat ini di DKPPK Kabupaten Nunukan masih minim sehingga pengelolaan sampah belum begitu efektif, namun hal ini cukup terbantu dengan penambahan tenaga kontrak untuk memaksimalkan dalam pengelolaan sampah. DKPPK Kabupaten Nunukan berusaha mengoptimalkan dengan jumlah personil yang ada, walaupun masih terlihat kekurangan dalam jumlah personil dalam pengelolaan sampah.

#### **4. *Actuating***

Pelaksanaan merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa, hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan bersama. *Actuating* (penggerak) merupakan suatu tindakan untuk menggerakkan orang yang ada di dalam instansi atau organisasi tersebut. Dalam hal pengelolaan persampahan pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan harus ada seorang

penggerak untuk menggerakkan semua anggota atau petugas yang ada di lapangan agar tercapainya sasaran sesuai dengan perencanaannya.

Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan terkait dengan upaya yang sudah dilakukan oleh pimpinan dalam mendorong atau pemberian motivasi terhadap pegawai atau personil khususnya dalam hal pengelolaan persampahan, mengatakan bahwa:

“Dalam melaksanakan pengelolaan sampah, biasanya kita melakukan kegiatan rutin atau rapat koodinasi yang setiap bulan dilakukan, selain itu juga kita melakukan rapat koodinasi dengan instansi lain dalam melaksanakan program kerja. Jadi, dalam rapat ini kita membahas apa-apa saja yang hendak dilakukan serta dalam rapat tersebut kita mengarahkan dan mengajak mereka agar mau bekerjasama dalam menyelesaikan program-program yang ada terutama pengelolaan sampah”.

Sekretaris Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan terkait dengan upaya yang sudah dilakukan oleh pimpinan dalam mendorong atau pemberian motivasi terhadap pegawai atau personil khususnya dalam hal pengelolaan persampahan, mengatakan bahwa:

“Pemberian motivasi kita lakukan setiap waktu kepada para pegawai terutama yang di lapangan mulai dari pemberian instruksi dari kepala dinas pada saat apel, instruksi kepala dinas pada rapat koordinasi di ikuti oleh seluruh unsur dinas sampai ke kepala UPT, pemberian insentif dan *reward* dari pegawai sampai petugas lapangan, pemberian sanksi bagi petugas yang malas berupa penundaan gaji atau honor”.

Kepala Bidang Kebersihan terkait dengan upaya yang sudah dilakukan oleh pimpinan dalam mendorong atau pemberian motivasi terhadap pegawai atau personil khususnya dalam hal pengelolaan persampahan, mengatakan bahwa:

“Untuk memotivasi para pegawai kita selalu memberikan motivasi, kita beri arahan dan kita membimbing, buat pegawai bekerja sesuai dengan aturan dan semangat dalam bekerja. Biasanya kita beri insentif, itu yang kita lakukan agar para pegawai tetap semangat dalam bekerja”.

Sedangkan Kepala Seksi Penanganan Kebersihan Lingkungan terkait dengan upaya yang sudah dilakukan oleh pimpinan dalam mendorong atau pemberian motivasi terhadap pegawai atau personil khususnya dalam hal pengelolaan persampahan, mengatakan bahwa:

“Pemberian motivasi disini kita selalu berikan arahan, kita ajarkan, dan diberi bimbingan. Lalu apabila mereka ada kendaladalam pekerjaan mereka kita mengadakan rapat koordinasi”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa upaya yang sudah dilakukan oleh pimpinan dalam mendorong atau pemberian motivasi terhadap pegawai atau personil khususnya dalam hal pengelolaan persampahan adalah adanya pemberian instruksi untuk mengikuti apel pagi setiap hari senin, selanjutnya pemberian insentif dan *reward* bagi para pegawai dan pemberian sanksi bagi petugas yang malas berupa penundaan gaji . Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk motivasi para pegawai agar mereka giat bekerja.

##### **5. *Controlling***

*Controlling* atau pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan alat untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan merupakan suatu tindakan yang mengawasi semua pelaksanaan tugas agar semua tugas dilakukan dengan baik dan sesuai dengan pedoman yang telah diberikan. Pengawasan yang dimaksud yakni mengawasi segala kegiatan atau tugas dalam pengelolaan sampah.

Tahap-tahap pengawasan pengelolaan persampahan pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara terdiri atas:

- a. Penentuan standar
- b. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan
- c. Pengukuran pelaksanaan kegiatan
- d. Perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan, dan
- e. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan.

Tipe-tipe pengawasan yang dilakukan dalam pengelolaan persampahan pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:

- a. *Feedforward Control* dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah dan penyimpangan dari standar tujuan dan memungkinkan koreksi sebelum suatu kegiatan tertentu diselesaikan.
- b. *Concurrent Control* merupakan proses dalam aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui dulu sebelum suatu kegiatan dilanjutkan atau untuk menjamin ketepatan pelaksanaan suatu kegiatan.
- c. *Feedback Control* mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah dilaksanakan.

Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan terkait dengan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Nunukan, mengatakan bahwa:

“Pengawasan yang dilakukan berjenjang mulai dari atas, Kepala Dinas, Kabid, dan semuanya ikut turun kebawah melakukan sidak. Turun di lapangan bersama dengan kepala UPT selaku penanggungjawab wilayah, untuk Kecamatan Nunukan belum punya UPTD yang ada hanya di Kecamatan Sebatik, seharusnya untuk TPA di Kel. Tanjung Harapan harus memiliki UPTD namun karena terbatasnya SDM menangani khusus lingkungan sangat minim.dibantu lagi oleh Kepala Rayon, untuk ikut

serta mengawasi dan mengevaluasi petugas dilapangan mulai dari tukang sapu, kendaraan sarana dan prasarana dan angkutan sampah itu tetap diawasi, mulai dari mulai keluar jam kerja sampai dengan mereka melakukan pengangkutan sampah dengan jam 10 malam itu kita selalu melakukan pengawasan”.

Sekretaris Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan terkait dengan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Nunukan, mengatakan bahwa:

“Bentuk pengawasan yang dilakukan adalah pengawasan melekat (pengawasan yang dilakukan dari atasan langsung terhadap bawahan langsung), lalu ada pengawasan fungsionalnya yang melekat dengan jabatan. Kemudian ada Kasi membina korlap, selaku pengawas orang-orang yang ada di lapangan”.

Sementara Kepala Bidang Kebersihan terkait dengan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Nunukan, mengatakan bahwa:

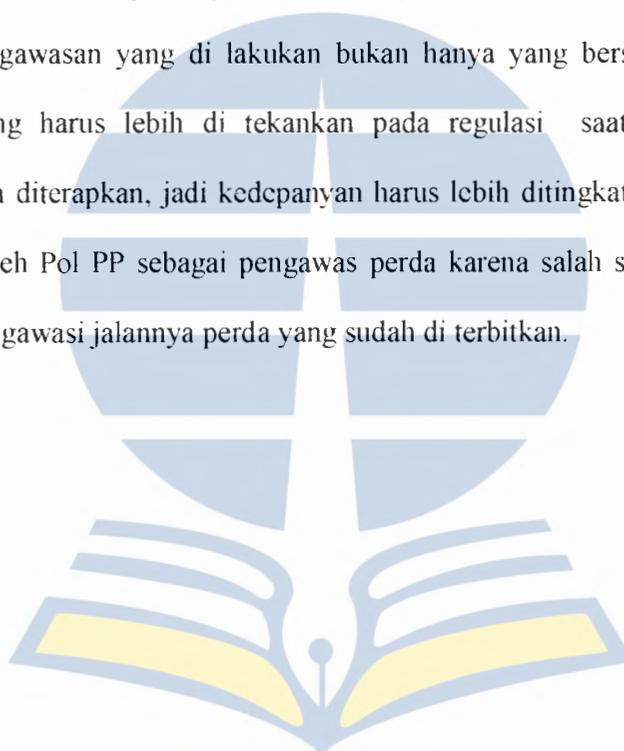
“Pengawasan selalu ada, adanya UPT di setiap kecamatan untuk melakukan pengawasan di tingkat kecamatan kalau di DKPPK Kabupaten Nunukan ada Kabid Kebersihan. Artinya pengawasan dilakukan secara rutin berkala dan berjenjang dan selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk UPT Kecamatan atau pun kelurahan namun untuk saat ini kepala UPT hanya ada di Kecamatan Sebatik”.

Sedangkan Kepala Seksi Penanganan Kebersihan Lingkungan terkait dengan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Nunukan, mengatakan bahwa:

“Selalu memonitoring kegiatan dalam pengelolaan sampah. Karena untuk melihat di mana yang menjadi kelemahan dari dinas kebersihan yang bekerja sama dengan dinas lain untuk selalu bisa diperbaiki dan sampai sekarang masih berjalan dengan baik”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa pengawasan yang dilakukan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Nunukan adalah pengawasan melekat (pengawasan yang dilakukan dari atasan langsung terhadap bawahan langsung). lalu ada pengawasan fungsionalnya yang melekat dengan jabatan. Dan Kasi yang mengawasi korlap di lapangan selaku pengawas orang-orang yang ada di lapangan.

Pengawasan yang di lakukan bukan hanya yang bersifat sesuai tupoksi namun yang harus lebih di tekankan pada regulasi saat ini masih belum sepenuhnya diterapkan, jadi kedepannya harus lebih ditingkatkan dan perlu juga di bantu oleh Pol PP sebagai pengawas perda karena salah satu tupoksi mereka adalah mengawasi jalannya perda yang sudah di terbitkan.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

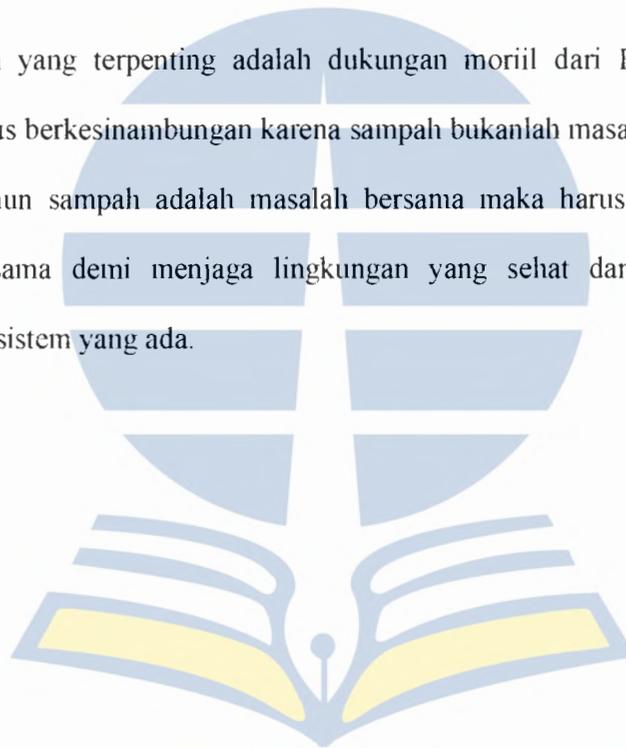
Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai efektivitas manajemen persampahan pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan Povinsi Kalimantan Utara, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen persampahan di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara masih belum efektif, hal ini dapat dilihat dari belum tercapainya target pengelolaan sampah di Kabupaten Nunukan yang disebabkan masih rendahnya penerapan prinsip-prinsip manajemen mulai dari *planning*, *organizing*, *actuating* hingga *controlling*, karena kondisi sarana dan prasarana yang tidak memadai, kurangnya partisipasi masyarakat serta penerapan regulasi yang kurang efektif.

#### B. Saran

Adapun hal-hal yang dapat dijadikan masukan atau bahan pertimbangan dalam manajemen pengelolaan sampah di Kabupaten Nunukan, yaitu:

1. Menambah jumlah pekerja khususnya di Bidang Kebersihan agar Pengelolaan Sampah di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara dapat berjalan lebih efektif dari sebelumnya.
2. Mengembangkan lokasi-lokasi percontohan peran serta masyarakat dalam kegiatan kebersihan atau persampahan serta mempromosikan program kegiatan 3R, kegiatan persampahan (pengelolaan daur ulang) yang berorientasi peningkatan sumber daya manusia, lingkungan dan ekonomi.

3. Harus ada sinkronisasi baik dari Perda sebagai payung hukum dan juga pelaksanaan teknis di lapangan antara retribusi dengan pengelolaanya. Pengelolaan sampah merupakan prasyarat untuk mendapatkan hasil (retribusi sampah) yang maksimal. Jika pengelolaanya sudah baik dari segi SDM hingga sarana dan prasaran maka hasil yang didapatkan dari kegiatan retribusi sampah dapat maksimal, sehingga kontribusi retribusi sampah dapat signifikan menyumbang PAD Kabupaten Nunukan.
4. Dan yang terpenting adalah dukungan moriil dari Pemerintah Daerah harus berkesinambungan karena sampah bukanlah masalah instansi terkait, namun sampah adalah masalah bersama maka harus segera di tangani bersama demi menjaga lingkungan yang sehat dan mempertahankan ekosistem yang ada.



## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2009). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Batinggi. (2005). *Materi pokok pelayanan umum*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Assauri, S. (2003). *Managemen produksi*. Jakarta: LPFE Universitas Indonesia.
- Dunn, W.N. (2000). *Pengantar analisis kebijakan publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Georgopolous & Tannembaum. 1995. *Efektivitas organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Griffin, R.W. (2004). *Manajemen*. Penerjemah: Gina Gania. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Handoko T.H. (2000). *Manajemen personalia dan sumber daya manusia*. Yogyakarta: Penerbit BPFE.
- Handayani, S. (1994). *Pengantar studi ilmu administrasi dan manajemen*. Jakarta: CV. Haji Masagung.
- Hasibuan, M.S.P. (2011). *Manajemen: Dasar, pengertian, dan masalah*. Jakarta: Bumi Aksara
- Hidayat. (1986). *Teori Efektifitas dalam kinerja karyawan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Irawan, P. (2007). *Penelitian kualitatif dan kuantitatif untuk ilmu-ilmu sosial*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Irawan, P. (2012). *Metodologi penelitian administrasi*. Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka.
- Kosasih. E. & Soewedo, H. (2009). *Manajemen perusahaan pelayaran: Suatu pendekatan praktis dalam bidang usaha pelayaran*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kurniawan, A. (2005). *Transformasi pelayanan publik*. Yogyakarta: Pembaharuan.
- Laporan Analisis Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan Tahun 2015.
- Lubis, H.S.B. & Martani, H. 1987. *Teori organisasi (Suatu pendekatan makro)*. Jakarta: Pusat Antar Universitas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Indonesia.

- Mantra, I.M. (2004). *Filsafat penelitian dan metode penelitian*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Mathis, R & Jackson, W. 2006. *Human Resources Development (Track MBA series terjemahan)*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Moloeng, L. J. (2009). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nadiasa, M., Sudarsana, D.K., & Yasmara, I.N. (2009). Manajemen Pengangkutan Sampah di Kota Amilapura. *Jurnal Ilmiah Teknik Sipil Vol.13 No. 2*.
- Narbuko, C. & Ahmadi, A. (2007). *Metodologi penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nawawi, H. (2005). *Metode penelitian bidang sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ratminto & Winarsih, A.S. (2012). *Manajemen pelayanan: Pengembangan model konseptual, penerapan, Citizen's Culture dan Standar Pelayanan Minimal*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan Tahun 2012-2016.
- Robbins, S.P. & Coulter. (2007). *Manajemen*. Jakarta: Indeks.
- Safroni, L. (2012). *Manajemen dan reformasi pelayanan publik dalam konteks birokrasi Indonesia*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Sagita, D.D. (2010). *Peran kualitas pelayanan pelanggan tentang pelayanan publik*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Sarwono, J. (2006). *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Siagian, S.P. (1987). *Manajemen*. Yogyakarta: Liberty.
- Steers, R.M. (1985). *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Stoner, J.A.F. (2006). *Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2008). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suprihatin (1999). *Teknologi fermentasi*. Surabaya: UNESA Press.

- Tangkilisan, H. N. S. (2005). *Evaluasi kebijakan publik*. Yogyakarta: Balairung & Co.
- Terry, G.R. (2012). *Prinsip-prinsip manajemen*. Penerjemah: J. Smith D.F.M. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Trisnawati, S.E. & Saefullah, K. (2005). *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Prenada Media.
- Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008, tentang Pengelolaan Sampah.
- Wahab, S. A. (2008). *Analisis kebijaksanaan: Dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wijayanti, I.D.S. (2008). *Manajemen*. Yogyakarta: Mitra Cendekia Press.
- Winarno, B. (2002). *Kebijakan publik: teori, proses dan studi kasus*. Yogyakarta: CAPS.



## PEDOMAN WAWANCARA

### EFEKTIVITAS MANAJEMEN PERSAMPAHAN PADA DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN PEMADAM KEBAKAAN KABUPATEN NUNUKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

#### A. Informan:

1. Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan
2. Sekretaris Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan
3. Kepala Bidang Kebersihan
4. Kepala Seksi Penanganan Kebersihan Lingkungan

#### B. Daftar Pertanyaan:

1. *Planning* (Perencanaan)
  - a. Apa saja rencana yang disusun dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Nunukan?
  - b. Apa yang harus dilakukan untuk menanggulangi masalah sampah di Kabupaten Nunukan?
2. *Organizing* (Pengorganisasian)
  - a. Bagaimana pembagian kerja yang dilakukan oleh aparat Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Nunukan?
  - b. Apakah Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan bekerjasama dengan instansi lain yang terkait dengan pengelolaan persampah di Kabupaten Nunukan? Bagaimana bentuk kerjasama yang dilakukan?
  - c. Apakah jumlah personil yang ada pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan sudah cukup dalam mengelola sampah di Kabupaten Nunukan?
3. *Actuating* (Pengaktualisasian)
  - a. Apa saja yang sudah dilakukan oleh pimpinan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan dalam mendorong atau pemberian motivasi terhadap pegawai atau personil khususnya dalam pengelolaan persampahan?
4. *Controlling* (Pengawasan)
  - a. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Nunukan?

## TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Informan	:	dr. Andi Ahmad, M.Kes.
Jabatan	:	Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan
Tempat Wawancara	:	Ruang Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan
Tanggal Wawancara	:	14 April 2016
Pewawancara	:	Umi Kalsum
<b>Hasil Wawancara</b>	:	
<b>A. Planning</b>		
1. Pertanyaan	:	Apa saja rencana yang disusun dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Nunukan?
Jawaban	:	Saat ini kita masih dengan sistem pengangkutan sampah, yaitu sistem <i>open dumping</i> . Terus perencanaan yang dilakukan saat ini kita masih berupaya untuk memperbaiki sarana dan prasarana, mulai dari armadanya, sistem operasional kerjanya, lalu kemudian kita tambah ada pembentukan satgas (satuan tugas) atau patroli sampah dimana patroli sampah itu dibantu dengan sarana, mobil patroli, yang dilengkapi sirine dan toa, jadi ketika ada yang membuang sampah di jalan satgas ini akan memberi peringatan dengan pengeras suara.
2. Pertanyaan	:	Apa yang harus dilakukan untuk menanggulangi masalah sampah di Kabupaten Nunukan?
Jawaban	:	Menurut saya kita harus berupaya mendaur ulang sampah dengan melibatkan semua sektor baik itu pemerintah, masyarakat dan dunia usaha sehingga sampah bukan lagi menjadi ancaman melainkan peluang bagi kita untuk meningkatkan PAD.
<b>B. Organizing</b>		
1. Pertanyaan	:	Bagaimana pembagian kerja yang dilakukan oleh aparat Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Nunukan?
Jawaban	:	Pembagian kerja sudah berjalan sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing, seperti dengan Dinas Pasar yang membantu pengelolaan sampah di pasar-pasar. Selanjutnya Dinas Perhubungan membantu pengelolaan sampah di lingkungan terminal. Selain itu Dinas PU juga membantu pengelolaan sampah di gorong-gorong. Lalu kita juga bekerja sama dengan LSM yang membantu sampah di daerah pesisir pantai.
2. Pertanyaan	:	Apakah Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan bekerja sama dengan instansi lain yang terkait dengan pengelolaan persampahan di Kabupaten Nunukan? Bagaimana bentuk kerjasama yang dilakukan?
Jawaban	:	Ya tentu seperti yang saya bilang tadi bahwa kita bekerjasama dengan beberapa dinas terkait seperti Dinas Pasar, Dinas Perhubungan, Dinas PU, LSM dan juga masyarakat.

3. Pertanyaan	: Apakah jumlah personil yang ada pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan sudah cukup dalam mengelola sampah di Kabupaten Nunukan?
Jawaban	: Untuk personil Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan sendiri selaku pengelola inti belum begitu efektif, kita sebisa mungkin mencukupi jumlah personil yang ada walaupun sebenarnya kita masih kekurangan dalam jumlah personil apalagi dalam hal pengelolaan sampah, tapi kita sudah cukup terbantu dengan adanya tenaga kontrak, jadi kita memaksimalkan personil yang ada dalam bekerja.
<b>C. Actuating</b>	
1. Pertanyaan	: Apa saja yang sudah dilakukan oleh pimpinan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan dalam mendorong atau pemberian motivasi terhadap pegawai atau personil khususnya dalam pengelolaan persampahan?
Jawaban	: Dalam melaksanakan pengelolaan sampah, biasanya kita melakukan kegiatan rutin atau rapat koordinasi yang setiap bulan dilakukan, selain itu juga kita melakukan rapat koordinasi dengan instansi lain dalam melaksanakan program kerja. Jadi, dalam rapat ini kita membahas apa-apa saja yang hendak dilakukan serta dalam rapat tersebut kita mengarahkan dan mengajak mereka agar mau bekerjasama dalam menyelesaikan program-program yang ada terutama pengelolaan sampah.
<b>D. Controlling</b>	
1. Pertanyaan	: Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Nunukan?
Jawaban	: Pengawasan yang dilakukan berjenjang mulai dari atas, Kepala Dinas, Kabid, dan semuanya ikut turun kebawah melakukan sidak. Turun di lapangan bersama dengan kepala UPT selaku penanggungjawab wilayah, dibantu lagi oleh Kepala Rayon, untuk ikut serta mengawasi dan mengevaluasi petugas dilapangan mulai dari tukang sapu, kendaraan sarana dan prasarana dan angkutan sampah itu tetap diawasi, mulai daari mulai keluar jam kerja sampai dengan mereka melakukan pengangkutan sampai dengan jam 10 malam itu kita selalu melakukan pengawasan.

## TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Informan	:	Drs. Amrosius L. Tukan
Jabatan	:	Sekretaris Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan
Tempat Wawancara	:	Ruang Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan
Tanggal Wawancara	:	14 April 2016
Pewawancara	:	Umi Kalsum
<b>Hasil Wawancara</b>	:	
<b>A. Planning</b>		
1. Pertanyaan	:	Apakah rencana yang disusun dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Nunukan?
Jawaban	:	Kita sedang memperbaiki kendaraan kita yang tidak layak pakai lagi, dan kita ada penambahan satgas untuk memaksimalkan pengelolaan sampah ini. Lalu dalam manajemen pengelolaan sampah DKPPK Kabupaten Nunukan memang pengelola inti dalam pengelolaan sampah ini, tapi kita juga melibatkan dinas lain juga untuk membantu kita seperti Dinas Pasar dan Dinas Perhubungan, kalau yang kita lakukan saat ini ya baru seperti itu.
2. Pertanyaan	:	Apakah yang harus dilakukan untuk menanggulangi masalah sampah di Kabupaten Nunukan?
Jawaban	:	Kita harus menambah jumlah personil, armada, TPA dan lain-lain. Bila perlu sampah-sampah tersebut kita manfaatkan supaya bisa mendatangkan uang.
<b>B. Organizing</b>		
1. Pertanyaan	:	Bagaimana pembagian kerja yang dilakukan oleh aparat Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Nunukan?
Jawaban	:	Terkait pengorganisasian untuk saat ini kita otomatis bekerja sama dengan Dinas Pasar, jika terjadi <i>trouble</i> dalam hal pengangkutan DKPPK Kabupaten Nunukan turut membantu, kemudian dengan Dinas Perhubungan dalam rangka pembersihan di terminal dan dengan dinas PU membersihkan di gorong-gorong jalan protokol. Kita selalu berkoordinasi dengan instansi lain dan saling mendukung dalam menjaga kebersihan di Kabupaten Nunukan. Terus dengan LSM kita juga bekerja sama tentang kebersihan di bandaran sungai dan pesisir pantai. Mereka menggiatkan masyarakat dilapangan dan dibertam menyiapkan kendaraannya untuk mengangkut sampah yang berada dilingkungan masyarakat.
2. Pertanyaan	:	Apakah Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan bekerja sama dengan instansi lain yang terkait dengan pengelolaan persampahan di Kabupaten Nunukan? Bagaimana bentuk kerjasama yang dilakukan?
Jawaban	:	Ya tentu saja dengan instansi yang tadi saya sebutkan.
3. Pertanyaan	:	Apakah jumlah personil yang ada pada Dinas Kebersihan,

	Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan sudah cukup dalam mengelola sampah di Kabupaten Nunukan?
Jawaban	: Menurut saya dengan dukungan personil yang ada saat ini memang belum efektif, kita masih membutuhkan penambahan personil terutama petugas di lapangan, selain itu juga sarana dan prasarana penunjang harus di tambah.
<b>C. Actuating</b>	
1. Pertanyaan	: Apa saja yang sudah dilakukan oleh pimpinan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan dalam mendorong atau pemberian motivasi terhadap pegawai atau personil khususnya dalam pengelolaan persampahan?
Jawaban	: Pemberian motivasi kita lakukan setiap waktu mulai dari pemberian instruksi dari kepala dinas pada saat apel, instruksi kepala dinas pada rapat koordinasi di ikuti oleh seluruh unsur dinas sampai ke kepala UPT, pemberian insentif dan <i>reward</i> dari pegawai sampai petugas lapangan, pemberian sanksi bagi petugas yang malas berupa penundaan gaji atau honor.
<b>D. Controlling</b>	
1. Pertanyaan	: Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Nunukan?
Jawaban	: Bentuk pengawasan yang dilakukan adalah pengawasan melekat (pengawasan yang dilakukan dari atasan langsung terhadap bawahan langsung), lalu ada pengawasan fungsionalnya yang melekat dengan jabatan. Kemudian ada UPT membina kepala rayon, selaku pengawas orang-orang yang ada di lapangan.



## TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Informan	: Syaifullah Djama, ST., MM.
Jabatan	: Kepala Bidang Kebersihan
Tempat Wawancara	: Ruang Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan
Tanggal Wawancara	: 14 April 2016
Pewawancara	: Umi Kalsum
<b>Hasil Wawancara</b>	:
<b>A. Planning</b>	
1. Pertanyaan	: Apa saja rencana yang disusun dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Nunukan?
Jawaban	: Perencanaan yang kami dilakukan saat ini dengan memperbaiki sarana dan prasarana kendaraan. Tadinya mobil kita tua semua, dibawah tahun 2000, sekarang sudah lebih dari 15 mobil yang sudah ada. Kemudian untuk menambah intensitas dilapangan kita membentuk Satgas, untuk sementara satgas berada di jalan protokol kota untuk <i>membakup</i> sampah-sampah yang bertaburan dan yang di buang sembarangan oleh masyarakat lewat kendaraan.
2. Pertanyaan	: Apa yang harus di lakukan untuk menanggulangi masalah sampah di Kabupaten Nunukan?
Jawaban	: Ya selain pengangkutan sampah saya kira kesadaran masyarakat juga perlu ditingkatkan agar tidak membuang sampah sembarangan dan juga sampah ini kan bisa bernilai ekonomis jika masyarakat kita kreatif. Selain itu juga sampah ini kan merupakan salah satu sumber PAD Kabupaten Nunukan.
<b>B. Organizing</b>	
1. Pertanyaan	: Bagaimana pembagian kerja yang dilakukan oleh aparat Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Nunukan?
Jawaban	: Pembagian kerja menurut saya sudah berjalan sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing.
2. Pertanyaan	: Apakah Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan bekerja sama dengan instansi lain yang terkait dengan pengelolaan persampahan di Kabupaten Nunukan? Bagaimana bentuk kerjasama yang dilakukan?
Jawaban	: Ya kita tentu tidak bisa berdiri sendiri, saat ini kita bekerjasama dengan Dinas Pasar, jika terjadi masalah dalam hal pengangkutan kita turut membantu, kemudian dengan Dinas Perhubungan dalam rangka pembersihan di terminal dan dengan dinas PU membersihkan di gorong-gorong jalan protokol. Kita Selalu berkoordinasi dengan instansi lain dan saling mendukung dalam menjaga kebersihan di Kabupaten Nunukan.
3. Pertanyaan	: Apakah jumlah personil yang ada pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan sudah cukup dalam mengelola sampah di Kabupaten Nunukan?

Jawaban	: Kalau personil DKPPK memaksimalkan saja, ya dibilang efektif benar juga belum. Tingkat kebersihan Kabupaten Nunukan berubah secara signifikan, jadi kita mengoptimalkan yang ada walaupun yang namanya kurang selalu kurang tapi kita harus mensyukuri bahwa kita sudah cukup diperhatikan oleh pak Bupati baik sarana dan prasarana maupun personil kita selalu di dukung.
<b>C. Actuating</b>	
1. Pertanyaan	: Apa saja yang sudah dilakukan oleh pimpinan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan dalam mendorong atau pemberian motivasi terhadap pegawai atau personil khususnya dalam pengelolaan persampahan?
Jawaban	: Untuk memotivasi para pegawai kita selalu memberikan motivasi, kita beri arahan dan kita membimbing, buat pegawai bekerja sesuai dengan aturan dan semangat dalam bekerja. Biasanya kita beri insentif, itu yang kita lakukan agar para pegawai tetap semangat dalam bekerja.
<b>D. Controlling</b>	
1. Pertanyaan	: Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Nunukan?
Jawaban	: Pengawasan selalu ada, adanya UPT di setiap kecamatan untuk melakukan pengawasan di tingkat kecamatan kalau di DKPPK Kabupaten Nunukan ada Kabid Kebersihan. Artinya pengawasan dilakukan secara rutin berkala dan berjenjang dan selalu berkoordinasi dengan pihak pihak terkait, termasuk UPT Kecamatan atau pun kelurahan.



## TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Informan	: Gabriel Sebatu, SIP.
Jabatan	: Kepala Seksi Penanganan Kebersihan Lingkungan
Tempat Wawancara	: Ruang Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan
Tanggal Wawancara	: 14 April 2016
Pewawancara	: Umi Kalsum
<b>Hasil Wawancara</b>	:
<b>A. Planning</b>	
1. Pertanyaan	: Apa saja rencana yang disusun dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Nunukan?
Jawaban	: Perencanaan yang dilakukan yang ada untuk saat sekarang ini mulai menambah armada pengangkut sampah dari unit terkecil seperti gerobak sampah yang masih minim.
2. Pertanyaan	: Apa yang harus dilakukan untuk menanggulangi masalah sampah di Kabupaten Nunukan?
Jawaban	: Ya kesadaran masyarakat untuk tertib dalam membuang sampah perlu kita tingkatkan, tentu sampah ini bukan hanya tanggungjawab DKPPK Kabupaten Nunukan saja.
<b>B. Organizing</b>	
1. Pertanyaan	: Bagaimana pembagian kerja yang dilakukan oleh aparat Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Nunukan?
Jawaban	: Pembagian kerja saya kira sudah berjalan sesuai dengan tupoksinya masing-masing.
2. Pertanyaan	: Apakah Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan bekerja sama dengan instansi lain yang terkait dengan pengelolaan persampahan di Kabupaten Nunukan? Bagaimana bentuk kerjasama yang dilakukan?
Jawaban	: Ya kita bekerjasama dengan Dinas Pasar, jika terjadi masalah dalam hal pengangkutan kita turut membantu, kemudian dengan Dinas Perhubungan dalam rangka pembersihan di terminal dan dengan Dinas PU membersihkan di gorong-gorong jalan protokol. Kita Selalu berkoordinasi dengan instansi lain dan saling mendukung dalam menjaga kebersihan di Kabupaten Nunukan.
3. Pertanyaan	: Apakah jumlah personil yang ada pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan sudah cukup dalam mengelola persampahan di Kabupaten Nunukan?
Jawaban	: Kalau personil kita berusaha memaksimalkan yang ada saja, ya memang saat ini masih belum efektif, apalagi dengan jumlah penduduk Kabupaten Nunukan yang bertambah setiap tahunnya membuat volume sampah menjadi bertambah.
<b>C. Actuating</b>	
1. Pertanyaan	: Apa saja yang sudah dilakukan oleh pimpinan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan dalam

	mendorong atau pemberian motivasi terhadap pegawai atau personil khususnya dalam pengelolaan persampahan?
Jawaban	: Pemberian motivasi disini kita selalu berikan arahan, kita ajarkan, dan diberi bimbingan. Lalu apabila mereka ada kendala dalam pekerjaan mereka kita mengadakan rapat koordinasi.
<b>D. Controlling</b>	
1. Pertanyaan	: Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Nunukan?
Jawaban	: Selalu memonitoring kegiatan dalam pengelolaan sampah. Karena untuk melihat di mana yang menjadi kelemahan dari dinas kebersihan yang bekerja sama dengan dinas lain untuk selalu bisa diperbaiki dan sampai sekarang masih berjalan dengan baik.

